



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



70TH

INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH

DIRGAHAYU
INDONESIA



NEWSLETTER

infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

INFO KHUSUS

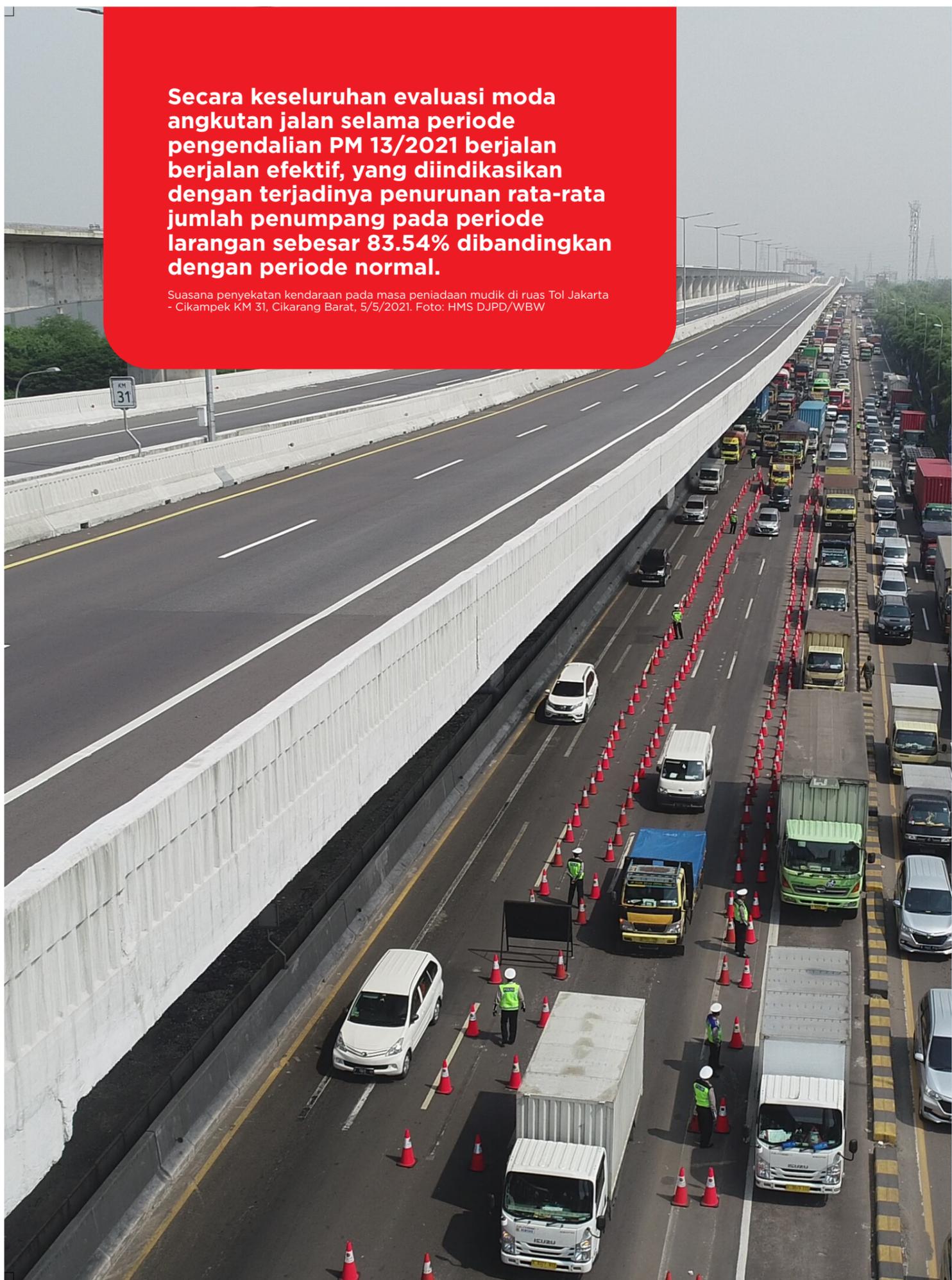
**Koordinasi
Lintas Instansi
Rakornis Hubdat
2021**



**PENGENDALIAN
TRANSPORTASI
PENIADAAN
MUDIK**

Secara keseluruhan evaluasi moda angkutan jalan selama periode pengendalian PM 13/2021 berjalan berjalan efektif, yang diindikasikan dengan terjadinya penurunan rata-rata jumlah penumpang pada periode larangan sebesar 83.54% dibandingkan dengan periode normal.

Suasana penyekatan kendaraan pada masa peniadaan mudik di ruas Tol Jakarta - Cikampek KM 31, Cikarang Barat, 5/5/2021. Foto: HMS DJPD/WBW



KOMPETISI VIDEO NGEYEL MUDIK, SIAP DIPUTARBALIK

Untuk lebih menggencarkan sosialisasi kebijakan peniadaan mudik Idul Fitri 1442H/2021 kepada masyarakat, Kementerian Perhubungan menggelar Lomba Pembuatan Video bertema "Sosialisasi Peniadaan Mudik 2021" bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenhub.

"Ini salah satu upaya kami untuk menggencarkan sosialisasi kebijakan peniadaan mudik kepada masyarakat, dengan melibatkan segenap ASN di lingkungan Kemenhub baik di pusat dan di daerah, yang mempunyai kreativitas dalam membuat video ajakan untuk tidak mudik," demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Selasa (27/4).

Menhub mengatakan, dengan banyaknya video ajakan untuk tidak mudik yang memenuhi ruang publik digital, diharapkan semakin banyak masyarakat yang teredukasi sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan perjalanan mudik di masa larangan bepergian untuk mudik yaitu mulai tanggal 6-17 Mei 2021.

Dari seluruh video yang terkumpul, terpilih 4 (empat) pemenang dengan masing-masing kategori yaitu:



Kategori Video Favorit Pilihan Menteri Perhubungan : "Ora Popo Ora Mudik, Senajan Ditinggal Rabi Dhisik" oleh BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta



Kategori Video Terlucu "Nyong Gagal Mudik" oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan



Kategori Video Cerita Terbaik: "Kalau Sayang Jangan Pulang" oleh BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat



Kategori Video Produksi Terbaik: "Ora Mudik Tetap Asik" oleh BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur

Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Di tengah masa pandemi dengan pembatasan mobilitas masyarakat, *Newsletter* infoHUBDAT menjadi salah satu media bagi kita untuk berbagi informasi. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, dengan harapan dapat menjadi bahan catatan dan refleksi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.



Pembaca yang budiman, saat ini Indonesia sedang mengalami gelombang kedua pandemi Covid-19. Saat ini terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif yang begitu tinggi ditambah jumlah kasus kematian akibat Covid-19 yang meningkat terutama di wilayah Jawa dan Bali. Pada periode lebaran yang lalu pemerintah telah menetapkan kebijakan peniadaan mudik. Secara keseluruhan evaluasi moda angkutan jalan selama periode peniadaan mudik yang dimulai 6 hingga 17 Mei 2021 berjalan efektif, yang diindikasikan dengan terjadinya penurunan rata-rata jumlah penumpang pada periode tersebut sebesar 83,54% dibandingkan dengan periode normal. Setelah periode peniadaan mudik pergerakan angkutan jalan kembali melonjak drastis bahkan melebihi periode normal yaitu naik sebesar 46,51%. Hal tersebut disebabkan karena pada tanggal 18-31 Mei 2021 walaupun masih berlaku pengetatan pengendalian transportasi tetapi operasional posko pemeriksaan di lapangan sudah tidak seketat masa larangan. Pergerakan angkutan jalan terlihat naik seiring dengan pilihan waktu arus balik yang tidak seragam diantara pelaku perjalanan yang terindikasi mudik.

Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkontribusi menekan penyebaran Covid-19 dengan menggelar tes swab antigen gratis di sejumlah lokasi terutama pada ruas-ruas jalan yang diprediksi akan banyak dilewati masyarakat usai periode peniadaan mudik. Dengan tes antigen gratis ini, diharapkan masyarakat yang terkonfirmasi positif dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut. Kegiatan ini bersifat sebagai filter, sehingga masyarakat yang dapat melanjutkan perjalanan adalah orang yang benar-benar sehat dan terbebas dari Covid-19.

Pembaca sekalian, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara aktif melakukan koordinasi lintas sektoral. Melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat, dilakukan konsolidasi dan koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas Perhubungan ataupun Dinas yang terkait, serta Badan Usaha baik nasional ataupun daerah. Dengan koordinasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan kinerja perhubungan darat secara lebih optimal terutama saat ini dalam menekan atau mengendalikan penyebaran Covid-19.

Masih banyak tugas yang menanti untuk dikerjakan, masih banyak masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Namun tetaplah bersemangat, dan lakukanlah tugas dengan ikhlas hati. Saya sampaikan juga himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jika keluar rumah, selalu kenakan masker, dan terapkan protokol kesehatan. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.



Foto Cover:
HMS DJPD/WBW

Suasana penyekatan kendaraan pada masa peniadaan mudik di ruas Tol Jakarta - Cikampek KM 31, Cikarang Barat, 5/5/2021

PENANGGUNG JAWAB
Marta Hardisarwono

REDAKTUR PELAKSANA
Endy Irawan

REDAKTUR UTAMA
Pitra Setiawan
Nanang Rahardjo
Aznal

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Dinda Siahaan
Alvia Lilian
Hanna Suryadika

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI
M. Aulia Dharma
Herman Wibowo
Bayu Adi Saputro
Andrew Bryan Agustinus

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Ratna Syaka Aprilda
Sari Hayu Hutami
Ely Rusnita
Nurhayati
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Didik Prasetyo
Rifai Dyan Armananta
Nolita
Rusdinal
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Nova Yulianasari Sopiha
Reza Saputra
Nurfadilah Sintia Ningrum
Ade Yunita
Rajib

KONTRIBUTOR
Junedi Sembiring
Nurita Aprilianing Tyas
Marisa
Wahyu Arya Putra
Prisca Magdalena Samosir
Arief Eko Sumba
Cristian Andri Mardhani
Laurence
Erlieka Affan
Ririn Scorviyanti
Rinto Mahendra Raharjo



Diterbitkan oleh:

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Gedung Karya Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas.hubdat@gmail.com

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

ditjen perhubungan darat Rajib

Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Pandemi belum juga berhenti. Bahkan kini Indonesia dikatakan memasuki gelombang kedua pandemi Covid-19. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan berperang melawan virus ini. Pada lebaran lalu, pemerintah membuat kebijakan peniadaan mudik, yang pada prinsipnya membatasi mobilitas masyarakat seminimal mungkin demi mencegah penyebaran Covid-19.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menampilkan Laporan Utama mengenai pengendalian transportasi peniadaan mudik, khususnya di sektor transportasi darat. Beberapa artikel telah kami siapkan untuk mendukung laporan utama, antara lain: Bus Berstiker Khusus Bukan untuk Mudik dan Korelasi Pergerakan Orang dalam Transportasi dengan Penyebaran Covid-19.

Kemudian, kami sajikan pula laporan khusus penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat seluruh Indonesia Tahun 2021. Dalam rubrik ini, beberapa artikel kami tampilkan, antara lain: Isu Strategis di Rakornis Hubdat 2021; dan Koordinasi Lintas Instansi Rakornis 2021.

Tak kalah menarik, ulasan mengenai Sinergi Pemerintah-Operator Wujudkan Angkutan yang Berkeselamatan. Selain itu juga artikel bertajuk Identifikasi Keselamatan Angkutan Barang. Diikuti dengan tulisan dari pengamat transportasi yang *concern* pada angkutan perkotaan dengan tulisan berjudul Membangun Transportasi Perkotaan.

Kami sajikan pula artikel mengenai Indonesia Bebas ODOL 2023 dalam Webinar Internasional. Selain itu juga kami sajikan ulasan mengenai Roadmap Kendaraan Listrik. Laporan kunjungan kerja Dirjen Perhubungan Darat ke Sulawesi Utara pun kami sajikan dalam artikel berjudul Terminal Tipe A Tangkoko, Bitung, Terminal Serasa Bandara.

Sebuah artikel tentang peresmian kapal penyeberangan turut melengkapi edisi kali ini yaitu artikel KMP. Takabonerate untuk Masyarakat Kepulauan Selayar.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (*)

daftar isi

EDISI TRIWULAN 02 / 2021



Penyekatan
Suasana penyekatan kendaraan yang melintas di ruas Tol Jakarta - Cikampek KM 31, Cikarang Barat, 7 Mei 2021. Foto: HMS DJPD/WBW



Info Utama

04 PENGENDALIAN TRANSPORTASI PENIADAAN MUDIK

Pandemi Covid-19 telah mengubah mobilitas penduduk, yaitu dalam bentuk pembatasan perjalanan. Mobilitas penduduk dipaksa berhenti atau sangat dibatasi karena pergerakan orang merupakan faktor penyebab utama dalam penyebaran Covid-19.

- 06 Bus Berstiker Khusus Bukan Untuk Mudik
- 10 Korelasi Pergerakan Orang dalam Transportasi dengan Penyebaran Covid-19



Info Selintas

- 36 • Menhub Tinjau Progres Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida Bali
- Kunjungan Menhub ke Jembatan Timbang Losarang, Indramayu
- Menhub Apresiasi Pembukaan Lintas Penyeberangan dari Banyuwangi ke Nusa Tenggara Barat
- Tinjau Waduk Kedungombo, Ditjen Hubdat Tingkatkan Aspek Keselamatan Angkutan Sungai-Danau
- Ditjen Hubdat Gelar Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Bidang LLAJ
- Pembahasan Konsep Tabel *Risk Control Matrix* (RCM) Tingkatkan Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan (PIPK) 2021
- Penandatanganan Mou Pemanfaatan Operasional Pelabuhan di KSPN Danau Toba

Info Khusus

- 16 Isu Strategis di Rakornis Hubdat 2021
- 18 Koordinasi Lintas Instansi Rakornis 2021

Info Angkutan

- 20 Sinergi Pemerintah-Operator Wujudkan Angkutan yang Berkeselamatan
- 22 Identifikasi Keselamatan Angkutan Barang
- 24 Membangun Transportasi Perkotaan

Info Lalu Lintas

- 26 Indonesia Bebas Odol 2023 Dalam Webinar Internasional

Info Sarana

- 28 Roadmap Kendaraan Listrik
- 30 Kendaraan Uji Keliling Permudah Uji Berkala

Info Prasarana

- 32 Terminal Tipe A Tangkoko Bitung, Terminal Serasa Bandara

Info TSDP

- 34 KMP. Takabonerate Untuk Masyarakat Kepulauan Selayar

Lensa Hubdat

- 41 Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan truk tangki yang over dimensi di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 16/2/2021. Foto: HMS DJPD/BYU



PENGENDALIAN TRANSPORTASI PENIADAAN MUDIK

Oleh: Tim infoHUBDAT

Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Periode peniadaan mudik Idul Fitri Tahun 1442 H adalah tanggal 6 - 17 Mei 2021.

Pandemi belum berakhir. Kendati terjadi penurunan kasus COVID-19, namun data dari Satgas COVID-19 menunjukkan jumlahnya masih sangat besar. Data dari Satgas COVID-19 juga menunjukkan, selama ada libur Panjang (*long weekend*), kasus COVID-19 hampir selalu bertambah secara signifikan. Selain itu telah terjadi gelombang ketiga pandemi di beberapa negara termasuk di Turki, India dan China. Karena itulah, berdasarkan rapat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) tanggal 23 Maret 2021, dan Rapat Koordinasi tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 pada 26 Maret 2021, pemerintah memutuskan mudik dilarang. Keputusan ini telah disampaikan Menko

PMK Muhadjir Effendy kepada publik. Pak Menko Muhadjir juga telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga Negara, tertanggal 31 Maret 2021. Surat ini berisi keputusan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran tahun 2021. Larangan berlaku baik untuk aparat sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. Kebijakan pelarangan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan COVID-19.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menjelaskan pengendalian transportasi darat dalam mendukung kebijakan peniadaan mudik. Pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan melalui larangan penggunaan sarana transportasi darat. "Yang dilarang adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang; kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor; dan kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan," jelas Dirjen Budi.

Namun demikian ada pengecualian yang boleh melakukan perjalanan. Yaitu mereka yang bekerja/perjalanan dinas (ASN, Pegawai BUMN/BUMD POLRI, TNI, Pegawai Swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tandatangan basah & cap basah); kunjungan keluarga sakit; kunjungan duka anggota keluarga meninggal; ibu hamil (dengan 1 orang pendamping);

kepentingan melahirkan (maks 2 orang pendamping); serta pelayanan kesehatan darurat.

Dirjen Budi melanjutkan, "Kemudian untuk pengecualian kendaraan yang masih boleh melakukan perjalanan yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara republik indonesia; kendaraan dinas operasional berplat dinas, tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia; kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; mobil barang dengan tidak membawa penumpang." Dirinya mengungkapkan bahwa kendaraan barang diperuntukkan membawa barang, bukan untuk membawa penumpang. "Seperti kasus tahun lalu, banyak mobil barang yang digunakan untuk membawa penumpang itu tidak boleh," jelasnya.

Selain itu pengecualian kendaraan yang boleh melakukan perjalanan juga berlaku untuk: kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan; kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat, ibu hamil, atau orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia; dan kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran indonesia, warga negara indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait wilayah aglomerasi, ada beberapa wilayah perkotaan yang masih boleh melakukan perjalanan. Wilayah tersebut meliputi Medan-Binjai-Deli-Serdang-Karo (Mebidangro); Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek); Bandung Raya; Semarang-Kendal-Demak-Ungaran-Purwodadi; Jogja Raya;

Solo Raya; Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang Kertosusila); dan Makassar- Sungguminasa-Takalar-Maros.

"Untuk pengawasan akan dilakukan oleh Polri dengan membuat pos-pos *check point* di beberapa lokasi," kata Dirjen Budi. Selain Polri akan ada kekuatan dari unsur TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Dirjen Budi juga mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan personel BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

"Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan seperti yang kami sampaikan tadi, dan tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan perjalanan, itu akan diputar balik," kata Dirjen Budi. Pada tahun lalu sanksi semacam ini telah pula diterapkan.

Selain itu ada ketentuan bagi perusahaan penyedia jasa transportasi darat yang harus mengembalikan biaya tiket secara penuh 100% (seratus persen) dan diberikan secara tunai kepada calon penumpang apabila telah terlanjur membeli tiket pada masa larangan mudik. Pengembalian biaya tiket tersebut dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon penumpang mengajukan permohonan pengembalian.

Untuk angkutan penyeberangan baik di lintas Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, dan penyeberangan yang lain, kendaraan yang boleh diangkut kapal Ro-ro adalah kendaraan pengangkut logistik/barang kebutuhan pokok, kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, kendaraan pengangkut petugas operasional, dan juga petugas penanganan Covid-19, serta kendaraan pemadam kebakaran, ambulance, dan mobil jenazah.(*)

BUS BERSTIKER KHUSUS BUKAN UNTUK MUDIK

Kementerian Perhubungan menerbitkan stiker khusus bagi bus yang akan tetap beroperasi selama masa peniadaan mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada 6-17 Mei. Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyampaikan bahwa kendaraan berstiker ini akan digunakan untuk mengangkut penumpang dengan keperluan SELAIN MUDIK.

Sesuai dengan ketentuan di Surat Edaran Satgas No 13 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 13 tahun 2021, dalam masa pelarangan mudik masih ada masyarakat yang dapat melakukan perjalanan NON MUDIK yaitu : bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil, persalinan dan orang dengan kepentingan tertentu non mudik yang semuanya dengan syarat membawa surat dari kepala desa/lurah setempat yang bertanda tangan basah/elektronik.

“Kami tegaskan bahwa bus dengan stiker khusus ini BUKAN melayani PEMUDIK, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan SELAIN MUDIK dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai peraturan dari Satgas dan Kementerian Perhubungan,” tegasnya.

Stiker ini diberikan secara gratis dan dikoordinir oleh Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Hubdat dan hanya bisa didapatkan dengan mengisi data pada

tautan: <https://forms.gle/Dq93DyFVgepPV2oW7>.

Dirjen Budi menambahkan, penempelan stiker ini juga bertujuan untuk mempermudah petugas Korlantas Polri dalam mengidentifikasi kendaraan yang melalui pos penyekatan, khususnya pada bus-bus yang memang boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang yang telah memenuhi syarat selama peniadaan mudik.

“Dengan penempelan stiker khusus di bus AKAP dan AKDP yang diperbolehkan beroperasi kita harapkan dapat berfungsi sebagai penandaan dan akan mempermudah kepolisian untuk melakukan pengawasan,” ujar Budi.

Dirjen Budi mengatakan, bus-bus yang beroperasi selama peniadaan mudik berjumlah 3.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jakarta, ada dua terminal bus yang dibuka selama peniadaan mudik Lebaran, yaitu Terminal Pulogebang dan Terminal Kalideres.

“Sementara itu bagi pegawai yang akan melakukan tugas atau perjalanan dinas mohon menyertakan persyaratan seperti

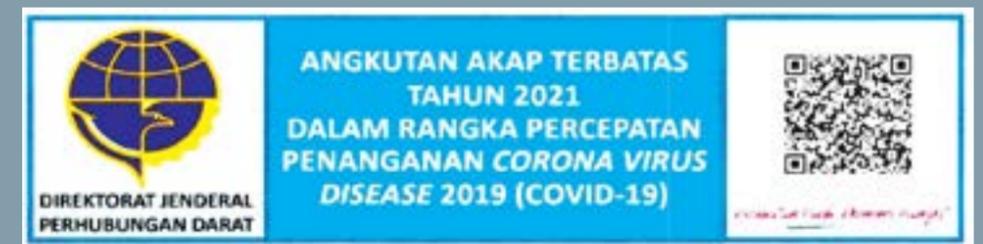


“Kami tegaskan bahwa bus dengan stiker khusus ini bukan melayani pemudik, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan selain mudik dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai peraturan dari satgas dan Kementerian Perhubungan.”

Budi Setiyadi
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

surat izin perjalanan. Jadi kami tegaskan kembali bus tetap tidak boleh mengangkut pemudik, hanya boleh mengangkut penumpang dengan persyaratan tertentu seperti ketentuan dari SE Satgas Nomor 13/2021 dan PM Nomor 13/2021,” jelasnya.*)

TERBATAS HANYA UNTUK KEPENTINGAN NON MUDIK: Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menempelkan stiker khusus bagi bus AKAP yang mengangkut penumpang non mudik yang telah memenuhi syarat di Terminal Terpadu Pulogebang (5/5/2021). Foto: HMS BPTJ



MEMENUHI SYARAT: Stiker ini bertujuan untuk mempermudah petugas Korlantas Polri dalam mengidentifikasi kendaraan yang melalui pos penyekatan, khususnya pada bus-bus yang memang boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang non mudik.

Kementerian Perhubungan mendukung upaya Polri dalam menindak travel gelap yang mengangkut penumpang. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Jumat (30/4).

“Travel gelap tarifnya tinggi sekali dan di dalam kendaraan tidak menerapkan protokol pencegahan Covid 19 karena kapasitas kendaraan yang bisa penuh sehingga potensi penularan Covid 19 sangat besar. Karena tidak berizin tentunya penumpang juga tidak ter-cover oleh asuransi Jasa Raharja. Dengan adanya travel gelap tersebut dapat merugikan angkutan yang legal berizin serta merusak ekosistem transportasi yang berizin,” urai Dirjen Budi dalam keterangannya.

Dirjen Budi secara khusus menyoroti kendaraan travel atau pun kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, katanya, “Kami sudah melakukan rapat bersama Kakorlantas Polri dan para Dirlantas Polda, bagi kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang, nanti akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian. Baik berupa penilangan maupun tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”

Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, hingga Kamis (29/4), telah diamankan sebanyak 115 travel gelap yang mematok biaya jauh lebih tinggi dari tarif biasanya. Kendaraan yang diamankan tersebut masuk kategori travel gelap karena tidak memiliki izin trayek, yaitu kendaraan-kendaraan plat hitam yang mengangkut penumpang dengan cara berbayar, dan juga yang menyimpang dari trayek seharusnya.

Senada dengan hal tersebut,



TINDAK TEGAS TRAVEL GELAP

Dirjen Budi kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa travel gelap. Masyarakat yang memiliki kepentingan khusus dapat menggunakan angkutan umum resmi seperti misalnya Bus AKAP yang berstiker khusus, tentunya dengan melengkapi persyaratan dan memenuhi protokol kesehatan mengacu pada PM 13 Tahun 2021.

Kakorlantas Polri, Irjen. Pol. Istiono, mengatakan, “Saya pastikan tidak ada yang lolos, karena kita bangun 333 titik dan sudah kita koordinasikan dengan

instansi terkait semua. Semua sinergi, kompak untuk melakukan langkah-langkah penyekatan secara menyeluruh. Baik penyekatan di perbatasan antar

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dan jajaran, bersama Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani memberikan pernyataan pers terkait penindakan travel gelap di lapangan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (29/4/2021). 2021. Foto: istimewa

provinsi maupun antar kabupaten. Termasuk travel gelap, saya pastikan akan saya tindak tegas.”

Dirjen Budi mengungkapkan pihaknya bersama Korlantas Polri, didukung TNI, unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan petugas terkait lainnya akan terjun bersama di lokasi Pos Penyekatan mulai tanggal 6 Mei 2021. Titik pengecekan akan dilaksanakan pada beberapa lokasi, antara lain akses utama keluar dan/atau masuk pada jalan tol dan jalan non tol; terminal angkutan penumpang; serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. (*)



Deretan kendaraan travel gelap yang disita jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Sebanyak 115 kendaraan travel gelap diamankan karena diduga kuat mengangkut pemudik di tengah masa pengetatan larangan mudik 2021. Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani



Pandemi Covid-19 telah mengubah mobilitas penduduk, yaitu dalam bentuk pembatasan perjalanan. Mobilitas penduduk dipaksa berhenti atau sangat dibatasi karena pergerakan orang merupakan faktor penyebab utama dalam penyebaran Covid-19. Pada awalnya, virus menyebar melalui orang-orang yang melakukan perjalanan internasional secara reguler, kemudian berkembang menjadi penularan di tingkat lokal (*local transmission*). Ini membuktikan bahwa mobilitas penduduk merupakan faktor penting dalam penyebaran Covid-19. Berdasarkan data statistik, periode liburan panjang selalu diikuti kenaikan kasus terkonfirmasi positif. Peningkatan mobilitas penduduk dapat menyebabkan peningkatan kasus Covid-19 di lokasi tujuan dan di lokasi asal. Kenaikan kasus terkonfirmasi positif dapat mengakibatkan kenaikan angka kematian karena beban di fasilitas kesehatan meningkat.

Tetapi temuan berkembang bahwa korelasi Interaksi Pergerakan dengan Episentrum dan Penyebaran Covid-19, secara umum terdapat hubungan antara episentrum dengan pergerakan untuk wilayah dalam kota tidak terlalu signifikan (artinya terdapat faktor lain yang mempengaruhi pergerakan). Temuan lainnya adalah korelasi aktivitas dengan penyebaran Covid-19. Secara umum, terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas di pusat keramaian terhadap penyebaran Covid-19 diantaranya pada pusat retail, taman, tempat wisata dan rekreasi (studi ITB, 2020).

Beberapa riset dan penelitian berikut ini bisa menjadi acuan dasar atau awal untuk menjelaskan bagaimana hubungan pergerakan orang menjadi media penyebaran virus Covid-19 ini. Sebagai contoh Studi ITB, 2020 yang meneliti peran

Korelasi Pergerakan Orang dalam Transportasi dengan Penyebaran Covid-19

Secara ringkas, program larangan mudik dari pemerintah sudah cukup berhasil menekan penularan Covid. Akan tetapi, pergerakan aktivitas lokal dan aglomerasi, pergerakan wisata serta mobilitas yang meningkat setelah libur panjang, ditambah dengan masih adanya pemudik yang lolos, membuat kenaikan kasus tidak dapat dipungkiri.

transportasi dalam penyebaran Covid-19 yaitu:
 1) memindahkan orang (*carrier*) dengan virus dari satu tempat ke tempat lain
 2) stasiun/terminal dan moda merupakan tempat berkumpul

banyak orang secara bersama-sama dalam ruang yang sama dalam waktu tertentu
 3) Terjadinya interaksi fisik antara *carrier* dengan orang lain
 4) Stasiun/terminal dan moda yang dipakai oleh orang banyak



Gambar Analisis Pola Pergerakan VS Pola Penyebaran Covid-19. Sumber: Balitbanghub



Pengunjung bersepeda motor antre untuk masuk ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (15/5/2021). Jumlah pengunjung dibatasi hanya 30 persen dari kapasitas normal dan hanya warga beridentitas DKI Jakarta yang boleh masuk. Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani

boleh jadi tidak dibersihkan secara sempurna

Dalam kaitan dengan penyebaran Covid-19 terjadi:
 1) *Imported case* (pergerakan antar wilayah)
 2) *local case* (pergerakan/ aktivitas dalam wilayah)

Berdasarkan data prediksi tetap mudik secara nasional pada periode 6 Mei (H-7) s.d 13 Mei (H1) apabila disandingkan dengan kasus Covid-19 dengan jeda waktu 7 hari sehingga dianalisis pada hari ke 8 menunjukkan adanya pola yang mirip dapat diduga bahwa pergerakan pemudik berdampak pada penyebaran Covid-19. Ada pola yang menunjukkan pada saat puncak mudik tanggal 8 Mei kasus Covid-19 meningkat pada hari ke 9 yaitu pada tanggal 16 Mei (jeda 8 hari), demikian juga puncak

mudik kedua terjadi pada tanggal 11 Mei dan kasus meningkat juga pada hari ke 9 yaitu pada 19 Mei.

Dalam kaitan dengan mobilitas penduduk atau pergerakan manusia yang ikut menentukan tinggi rendahnya tingkat penyebaran Covid-19 dan pemerintah Indonesia memutuskan PSBB/PPKM dan bukan *lockdown*, menjadi pertanyaan sejauh mana pergerakan manusia atau migrasi berkorelasi dengan penyebaran virus Corona di negara kepulauan terbesar ini? Pada masa pengendalian transportasi Idul Fitri 1442H, Kementerian Perhubungan memastikan pergerakan transportasi dan penumpang cukup terkendali. Ini sebagai dampak larangan mudik yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Larangan

mudik ini berdampak bagi seluruh moda angkutan. Tetapi pertanyaan timbul, bagaimana kasus lonjakan Covid-19 terjadi sangat signifikan setelah 14 hari larangan mudik dan berterusan dengan tingkat yang sangat tinggi (gelombang ke-2 yang bahkan melebihi gelombang 1?)

Terjadi penularan di komunitas tingkat kota-kota itu sendiri (karena tetap berada didalam kota dan pergerakan di dalam kota dan aglomerasi perkotaan relatif tinggi. Di masa larangan dan pasca larangan warga lokal/ aglomerasi tetap berinteraksi selama perayaan Lebaran, bukan sepenuhnya dari pemudik tetapi antarsesama warga lokal/ aglomerasi perkotaan itu sendiri. Maka larangan mudik saja tidak akan mengurangi penularan. Karena pada masa larangan dan

ketika Lebaran, tidak mengurangi mobilitas, maka penularan akan meningkat.

Dari beberapa data penelitian awal dan analisis awal berbagai sumber tentang hubungan mobilitas orang dengan penyebaran Covid-19 dapat di simpulkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk larangan mudik dengan pengendalian transportasi PM 13/2021 adalah sangat tepat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tetapi tidak cukup efektif dikarenakan pemerintah hanya melakukan larangan mudik, tetapi tidak ada pembatasan kerumunan dan mobilitas yang ada di wilayah satu lokalitas, setelah lonjakan kasus baru beberapa kebijakan keluar di setiap kota seperti PPKM mikro dan lainnya. Dari fakta-fakta di lapangan yang ada ini indikasi apa atau benang merah apa yang kita bisa tarik dalam kaitan dengan pergerakan manusia dan penyebaran virus corona? Intinya dapat disimpulkan bukan mudiknya tetapi mobilitasnya, sehingga banyak faktor yang memengaruhi lonjakan Covid-19 dan ini dikarenakan mobilitas (bukan mudiknya saja) tetapi pergerakan yang tidak dibatasi seperti pergerakan lokal, aglomerasi, wisata, dll. Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa masyarakat dalam satuan aglomerasi, yang bisa terdiri dari sejumlah kabupaten atau kota, tetap dapat mudik secara lokal ditambah kebijakan atau himbauan perjalanan wisata. Di sinilah kunci kelemahan pengendalian pergerakan tahun 2021, bukan dari ketidakefektifan PM 13/2021 tentang larangan mudik tetapi dari segi penanganan secara nasional (kebijakan nasional) untuk pengendalian mobilitas/pergerakan.

Bagaimana dengan kebijakan yang seharusnya? Selain melarang mudik, pemerintah seharusnya

juga menutup interaksi antarwilayah dengan pembatasan ketat (dinamakan pembatasan/perintah pergerakan). Jadi yang dikendalikan pergerakannya, mobilitasnya, interaksinya. Sebelum masa larangan dan setelah masa larangan untuk jangka waktu yang diperkirakan dari beberapa simulasi dan penelitian pakar epidemiolog yang berkisar 3 bulan secara ketat untuk memutus mata rantai Covid-19.

Upaya menekan penularan Covid-19 tidak dapat dilihat dalam batasan wilayah administrasi. Contoh, batas wilayah DKI Jakarta dengan kawasan sekitarnya, seperti Depok, Bekasi atau Tangerang, yang dalam kaca mata penanganan pandemi menjadi tipis sekali. Begitupun dalam skala yang lebih luas. Tidak hanya mudik nasional, mudik antarnegara juga menjadi potensi peningkatan kasus Covid-19, seperti yang dilakukan para pekerja migran. Pandemi kemungkinan akan menekan jumlah pemudik lintas negara, tetapi mungkin tidak akan menghilangkannya sama sekali. Beberapa kasus terjadi pergerakan di perbatasan Indonesia Malaysia seperti di Kepri Batam dan Tanjung Pinang serta lintas batas negara.

Efek larangan mudik sesuai PM 13/2021 secara pengendalian dapat menekan mobilitas dan potensi kerumunan yang lebih besar. Bila tidak dicegah maka lonjakan kasus akan naik melebihi situasi saat ini (skenario tanpa pengendalian) karena efek mudik ditambah tidak ada kontrol aktivitas lokal/aglomerasi ditambah wisata. Jika pengendalian pergerakan melalui larangan mudik maka sebaiknya juga tidak mendorong masyarakat melakukan kegiatan wisata meskipun di tingkat lokal. Selain itu, harus ada edukasi agar selama masa larangan dan pengetatan masyarakat tetap menjaga



Pengunjung berenang di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta, Jumat (14/5/2021). Pemprov DKI Jakarta pada libur Lebaran 2021 membuka sejumlah tempat wisata, salah satunya Ancol. Foto: Liputan6.com/Johan Tallo

interaksi. Secara tradisional, ketika Lebaran, mobilitas dan interaksi sosialnya sangat cair dan meningkat. Jika pada saat itu tidak dilakukan pembatasan yang disebut KONTROL AKTIVITAS, orang akan melakukan aktivitas tradisionalnya seperti biasa. Apalagi kemudian ada endorsemen untuk mengunjungi tempat wisata sebagai contoh. Dalam situasi ini, walaupun larangan mudik terlihat cukup efektif, justru lonjakan covid yang terjadi dikarenakan di dalam populasi lokal sendiri, sudah ada transmisi virus yang terjadi secara terus menerus.

Secara ringkas, program larangan mudik dari pemerintah sudah cukup berhasil menekan penularan Covid. Akan tetapi, pergerakan aktivitas lokal dan aglomerasi, pergerakan wisata serta mobilitas yang meningkat setelah libur panjang, ditambah dengan masih adanya pemudik yang lolos, membuat kenaikan kasus tidak dapat dipungkiri.

Walaupun pemerintah tidak melakukan permodelan (skenario tanpa larangan mudik), jika tidak ada pembatasan saat periode mudik, kenaikan kasus bisa menjadi jadi lebih parah. "Do something" dalam permodelan skenario larangan dan tanpa larangan akan membuktikan tren pergerakan ini yang mempengaruhi lonjakan Covid-19.

Terpecahkannya rekor kasus harian Covid-19 contohnya di DKI Jakarta dengan lebih dari 5.000 kasus per hari ternyata bukan "akhir" dari segalanya. Transmisi virus corona secara besar-besaran diprediksi baru akan terjadi dalam waktu mendatang, terlebih varian baru corona yang lebih menular baru terdeteksi di Ibu Kota. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memprediksi bahwa jumlah pasien Covid-19 akan meledak di bulan Agustus mendatang, dengan 218.000 kasus aktif. Saat ini, kasus aktif di Jakarta ada di angka 30.142. Artinya, pasien yang butuh perawatan ataupun

isolasi nantinya bisa meningkat tujuh kali lipat dari sekarang.

Beberapa kerangka kebijakan sudah dicanangkan pemerintah dan beberapa studi kebijakan untuk pengendalian transportasi sudah direkomendasikan sejak tahun 2020, diantaranya: penerapan kebijakan khususnya *physical distancing* dan protokol kesehatan pada sarana prasarana angkutan umum tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan kebijakan yang menyangkut *demand management*. Kontrol yang ketat terkait aktivitas penting dilakukan. Data menunjukkan bahwa korelasi tertinggi antara besarnya kegiatan dan penambahan kasus Covid-19 adalah pada kegiatan pusat retail dan rekreasi.*)

Sumber: Laporan Akhir Pengendalian Transportasi Pada Masa Idul Fitri Tahun 2021 (1442 H) Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Kemenhub. Juni 2021.

REKOMENDASI

1. Penguatan penyekatan jalan non-tol (arteri).
2. Koordinasi antar instansi dalam mengeluarkan kebijakan pengendalian transportasi dan memastikan sinkronisasi kebijakan
3. Pemantauan dan pengendalian ketat di titik-titik simpul transportasi
4. Tersedia pusat karantina sementara di titik simpul sesuai protokol Kesehatan.
5. Kebijakan kontrol dan pengendalian aktivitas pergerakan lokal/aglomerasi
6. Survei menyeluruh dilakukan 3 bulan sebelum rencana pengendalian dan kontrol aktivitas dan terdiri dari tahapan survei
7. Protokol Kesehatan diperketat di seluruh titik simpul transportasi
8. Penerapan kontrol aktivitas dan pergerakan transportasi secara bertahap tanpa melihat apakah libur panjang, kegiatan keagamaan tetapi direncanakan secara bertahap dengan tujuan pembatasan pergerakan
9. Secara tegas memberlakukan "Perintah Larangan Aktivitas/Mobilitas" - "Activity/Transport Movement Order"
10. Kebijakan Pembatasan Manajemen Permintaan Perjalanan - *Transport Demand Management*
11. Sosialisasi peraturan pengendalian harus dilakukan secara meluas tidak hanya melalui media masa dan online tetapi bekerjasama dengan setiap pemerintah daerah/dinas terkait didaerah supaya pemahaman masyarakat lebih tinggi. Survei tingkat pemahaman masyarakat perlu dilakukan guna mengambil tindakan lanjutan secara cepat dan efektif.
12. Perlu dilakukan studi mendalam dampak ekonomi transportasi dimasa pandemik sehingga di masa depan lebih mudah dicari alternatif solusi guna mencegah jatuhnya industri transportasi umum.

Secara keseluruhan evaluasi moda angkutan jalan selama periode pengendalian PM 13/2021 berjalan efektif, yang diindikasikan dengan terjadinya penurunan rata-rata jumlah penumpang pada periode larangan sebesar 83.54% dibandingkan dengan periode normal. Setelah periode larangan pergerakan angkutan jalan kembali melonjak drastis bahkan melebihi periode normal yaitu naik sebesar 46.51%. Hal tersebut disebabkan karena pada tanggal 18-31 Mei 2021 walaupun masih berlaku pengetatan pengendalian transportasi tetapi operasional posko pemeriksaan di lapangan sudah tidak seketat masa larangan. Pergerakan angkutan jalan terlihat naik seiring dengan pilihan waktu arus balik yang tidak seragam diantara pelaku perjalanan yang terindikasi mudik.

Pengendalian Lalu Lintas di Jalan Non-Tol

Dengan diberlakukannya PM 13/2021 tentang pengendalian transportasi Idul Fitri dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pihak Kepolisian yang dibantu Dinas Perhubungan dan TNI telah menduduki beberapa titik pemeriksaan larangan mudik yang tersebar diberbagai lokasi. Terdapat 16 titik penyekatan termasuk di beberapa jalan arteri non-tol di Jabodetabek.

Sebelumnya Polri merencanakan ada 333 titik penyekatan yang tersebar dari Lampung, Pulau Jawa hingga Bali. Namun, belakangan kepolisian memutuskan untuk menambah jumlah pos penyekatan menjadi 381 titik. Ratusan titik sekat itu menyebar dari Sumatera Selatan hingga Pulau Bali khususnya di jalan non-tol. Jika menilik pola arus mudik lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar mobilitas warga biasa terjadi dari Jakarta dan sekitarnya ke daerah-daerah lain. Karena itu, penjagaan di ratusan



Menhub Budi Karya Sumadi bersama Ketua DPR Puan Maharani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo meninjau Posko Penyekatan Larangan Mudik, Cikarang Barat, 12/5/2021. Foto: HMS DJPD/CAS

Pengendalian Lalu Lintas Jalan pada Masa Peniadaan Mudik

titik penyekatan yang tersebar di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat penting untuk dilakukan. Di jalan non-tol mengingat pemudik terbesar adalah menggunakan sepeda motor.

Pengendalian Lalu Lintas di Jalan Tol

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah menyiapkan sebanyak 61 titik penyekatan mudik di gerbang tol (GT) Trans Jawa dan Trans Sumatera. Persiapan tersebut melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Korlantas Polri, dan stakeholder lainnya. Sedangkan Titik-titik pengendalian

transportasi selama masa mudik di Jalan Tol Jasa Marga Group adalah: Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi. Salah satu titik penyekatan dilakukan pada Kilometer 31A dan Kilometer 46+500 pada Tol Jakarta-Cikampek. Dari keseluruhan pengendalian pergerakan di jalan tol terlihat penurunan yang signifikan dan dampak dari peniadaan mudik dan masyarakat cukup kooperatif terhadap kegiatan ini menjadi faktor utama.

Pengendalian transportasi selama masa mudik ini dilakukan

oleh personel Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan petugas gabungan dari unsur TNI, Satpol PP, Dishub untuk membatasi keluar masuknya kendaraan pribadi dan angkutan penumpang. Kendaraan tersebut diarahkan kembali ke wilayah asalnya dengan mekanisme dikeluarkan di gerbang tol terdekat, kecuali kendaraan dinas, petugas, ambulans dan pemadam kebakaran serta angkutan logistik. Sementara itu, Jasa Marga menyiapkan dukungan berupa perambuan dan penempatan petugas untuk kanalisasi lajur menuju titik pengendalian transportasi.

Pengendalian Lalu Lintas Check Point Penyekatan

Dari catatan Korlantas, selama larangan mudik Lebaran yang diberlakukan sejak 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021, tercatat setidaknya ada 461.206 kendaraan

yang diputar balik oleh petugas. Data ini menunjukkan ada penurunan sebesar 25% secara keseluruhan yang masuk Jakarta di periode larangan mudik 6-17 Mei 2021. Sedangkan, kekuatan yang dikerahkan mencapai 166.734 anggota dengan rincian dari Mabes Polri 834 personel, Polda jajaran 93.336 personel, dan instansi terkait lainnya 72.564 personel. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencegah/ melarang pergerakan mudik untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.

Berdasarkan data, kendaraan yang diputar balik didominasi sepeda motor diikuti kendaraan pribadi, kendaraan jenis umum

Dari data Korlantas Polri, selama peniadaan mudik Lebaran yang diberlakukan sejak 6-17 Mei 2021, tercatat setidaknya ada 461.206 kendaraan yang diputar balik oleh petugas.

sisanya kendaraan jenis angkutan barang. Dengan diberlakukannya larangan, dampak ini terlihat di pergerakan aglomerasi seperti Jabodetabek. Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperlihatkan adanya 4,6 juta kendaraan yang keluar-masuk wilayah Ibu Kota selama masa larangan mudik Lebaran, 6-17 Mei 2021.

Jumlah tersebut merupakan hasil akumulasi dari beberapa Gerbang Tol Utama dan pos penyekatan besar di jalur arteri. Dibandingkan tahun lalu, tampak mobilitas masyarakat cukup tinggi di aglomerasi perkotaan Jabodetabek mengingat mereka tidak mudik tahun 2021. Secara dapat dilihat dari keseluruhan operasi ketupat 2021 dengan fungsi dan tujuan mengendalikan arus mudik dalam rangka

mencegah penyebaran virus COVID-19 cukup efektif. Tetapi diyakini arus balik belum optimal dan diprediksi masih banyak yang belum melakukan perjalanan balik dengan kondisi penyekatan yang diperpanjang hingga 31 Mei 2021.

Dari data dilapangan juga menunjukkan beberapa fenomena, jumlah penyekatan di tambah menjadi 381 titik dan dinilai sebagai upaya pencegahan yang berjalan maksimal. Selama 8 hari yang diputarbalikan kurang lebih 600.000 kendaraan. Travel gelap yang ditindak tegas kurang lebih 600 kendaraan. (*)

Sumber: Laporan Akhir Pengendalian Transportasi Pada Masa Idul Fitri Tahun 2021 (1442 H) Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Kemenhub. Juni 2021.

Isu Strategis di Rakornis Hubdat 2021

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Tahun 2021 dengan mengusung tema “Transformasi Perhubungan Darat untuk Menghadapi Tantangan dan Peluang”.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan 5 (lima) isu strategis di sektor perhubungan darat yang perlu penanganan cepat. Hal tersebut disampaikan Menhub dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat bertema “Transformasi Perhubungan Darat Untuk Menghadapi Tantangan dan Peluang”, yang digelar secara virtual pada Kamis (8/4).

Menurut Menhub, sejumlah isu strategis yang ada di sektor transportasi darat yang dibutuhkan penanganan yang cepat, tepat dan berkelanjutan diantaranya adalah: Pertama, persiapan pengendalian transportasi di masa Angkutan Lebaran Tahun 2021. Kedua, penanganan angkutan barang *Over Dimensi* dan *Over Load* (ODOL). Ketiga, kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi darat. Keempat, peningkatan keamanan dan keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Dan kelima, dukungan *Long Distance Ferry* (LDF) pada Logistik Nasional.

“Di tengah pandemi covid-19 yang melanda dunia, berdampak pada sektor transportasi, termasuk

sektor perhubungan darat. Melalui wadah Rakornis ini semoga bisa dihasilkan opsi dan solusi permasalahan isu strategis yang ada di sektor perhubungan darat di tengah masa pandemi ini,” kata Menhub.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yakni : Pertama, terus mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di sektor transportasi darat sebagai upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19. Kedua, meningkatkan penerapan dan optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam meningkatkan layanan di sektor transportasi darat.

Ketiga, mendukung penindakan terhadap pelanggaran *overloading* dengan penurunan sebagian muatan dan untuk pelanggaran *over-dimensi* agar koordinasi dengan kepolisian untuk penindakan tegasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 277 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keempat, mendorong tumbuhnya angkutan perkotaan dengan mekanisme/strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan.



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan *keynote speech* sekaligus sambutan pembukaan secara virtual pada Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat, Jakarta, 8/4/2021. Foto: HMS DJPD

Kemudian yang kelima, mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Keenam, melakukan evaluasi terus menerus baik masyarakat dan para petugas sehingga mempunyai etos kerja dan budaya yang kondusif demi terselenggaranya transportasi yang berkeselamatan. Dan ketujuh, terus melakukan inovasi pola metode dan pendekatan untuk mewujudkan visi transportasi darat yang diharapkan oleh Pemerintah.

“Untuk melakukan itu, Kemenhub tidak bisa sendiri. Antara pusat dan daerah dan antara pemerintah dan swasta harus bahu membahu untuk meningkatkan kinerja, khususnya di sektor perhubungan darat. Dengan penanganan yang

semakin baik dan pemberian vaksin yang semakin meluas, semoga pandemi Covid-19 ini dapat kita lalui dan pertumbuhan ekonomi dapat membaik kembali,” tutur Menhub.

Selain itu, Menhub juga meminta jajaran Ditjen Perhubungan Darat untuk menyosialisasikan kebijakan pengendalian transportasi pada masa mudik lebaran tahun ini kepada masyarakat, menyusul adanya kebijakan pemerintah untuk meniadakan mudik guna mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

“Penjelasan ini sangat penting untuk diketahui masyarakat agar mereka mengerti alasan pemerintah melarang mudik pada tahun ini,” ucap Menhub.

Sebelumnya, Menhub telah menyampaikan alasan pemerintah meniadakan mudik tahun ini, diantaranya yaitu : terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada Januari lalu atau setelah libur Natal dan Tahun Baru, lebih dari 100 orang nakes meninggal dunia, penduduk usia lansia yang berisiko sangat tinggi jika terpapar Covid-19, dan beberapa negara sedang mengalami satu kenaikan kasus Covid-19 yang sangat signifikan seperti USA, India dan beberapa negara Eropa.

Dalam Rakornis tersebut, juga dilakukan sejumlah kegiatan, yakni : penyerahan penghargaan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) atas Prestasi melaksanakan penegakan hukum pasal 277, UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan; penyerahan penghargaan kepada BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) atas dedikasi dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan tol kepada PT. Jasa Marga Persero Tbk dan PT. Lintas Marga Sedaya, Astra Tol Cipali; penyerahan Sertifikat SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) Perusahaan Angkutan Umum; Peluncuran *dashboard* e-Hubdat; dan peresmian penggunaan GeNose di Terminal Tipe A.

Turut hadir dalam Rakornis, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; Direksi BUMN dan BUMD Mitra Kerja Ditjen Perhubungan Darat, Para Kepala Balai/UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, dan para pakar transportasi.*



Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat seluruh Indonesia di Crowne Plaza, Jakarta, 8/4/2021

Koordinasi Lintas Instansi Rakornis 2021

Koordinasi inilah yang akan melakukan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat, sehingga dapat dilakukan proyeksi, kaji ulang berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis perhubungan darat, agar berjalan optimal guna peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang perhubungan darat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, pada Kamis (8/4) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Tahun 2021, di Crowne Plaza, Jakarta.

Kegiatan Rakornis tahun ini mengusung tema “Transformasi Perhubungan Darat untuk Menghadapi Tantangan dan Peluang”. Direktur Jenderal

Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi menyatakan bahwa pada tahun ini penyelenggaraan Rakornis Bidang Perhubungan Darat diselenggarakan secara virtual dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan Rakornis ini dimaksudkan sebagai salah satu bagian cara kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun Kementerian Perhubungan dalam melakukan

konsolidasi dan koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas Perhubungan ataupun Dinas yang terkait, serta Badan Usaha baik nasional ataupun daerah.

“Koordinasi inilah yang akan melakukan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat, sehingga dapat dilakukan proyeksi, kaji ulang berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis perhubungan darat, agar berjalan optimal guna peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang perhubungan darat yang lebih baik di pusat maupun di daerah, terutama bagaimana sektor transportasi darat dalam membantu penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19,” ujar Dirjen Budi.

“Dengan pelaksanaan Rakornis Ditjen Hubdat secara virtual ini semakin menguatkan bahwa perlunya perencanaan, pemanfaatan, dan optimalisasi bahwa pentingnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tidak hanya karena ada alasan pandemi Covid-19, tetapi juga peranan TIK

yang semakin meluas sehingga bisa diterapkan dalam dukungan pengambilan keputusan/kebijakan dan bagian dari operasional teknis harian,” kata Dirjen Budi.

Selepas kegiatan diskusi tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono mengapresiasi sebanyak 2.798 peserta yang bergabung dalam kegiatan ini secara virtual. Hal ini disampaikannya dalam sambutan penutup kegiatan tersebut.

“Peserta terdiri dari para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Direksi BUMN dan BUMD mitra kerja Ditjen Perhubungan Darat, para Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,” tambah Marta.

Marta menjabarkan bahwa sesuai harapan Bapak Menteri Perhubungan yang disampaikan pada pembukaan Rakornis tahun ini diharapkan dapat menjadi wadah guna meningkatkan komunikasi, koordinasi dan persamaan persepsi antara instansi sekaligus media untuk berbagi pandangan, *transfer knowledge* terkait isu-isu strategis



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat seluruh Indonesia, 8/4/2021

sektor transportasi darat yang bisa dijadikan referensi di masing-masing instansi.

“Ada beberapa hal yang dapat dirumuskan dari beberapa diskusi panel yang dilakukan salah satunya yakni diperlukan *Road Map* penanganan *Over Dimensi* dan *Over Loading* (ODOL) yang disepakati bersama semua pihak sehingga menjadikan dasar dalam upaya mencapai target *Zero ODOL* 2023 dan menciptakan lalu lintas yang aman dan

berkeselamatan,” urai Marta. Selanjutnya, Marta juga menjabarkan mengenai pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh sebab itu antara pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya.*



Beberapa waktu belakangan ini kecelakaan pada bus dan truk kerap terjadi dengan tingkat fatalitas serta jumlah korbannya cukup tinggi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar Webinar “Sinergi Pemerintah dan Operator dalam Mewujudkan Angkutan yang Berkeselamatan” pada Selasa (20/4). Webinar ini digelar karena dirasa perlu adanya sosialisasi pemetaan *risk* dan *hazard* yang diuraikan secara lebih komprehensif terkait penyebab kecelakaan pada bus dan truk serta apa yang menjadi faktor penyebab peningkatan fatalitas korbannya sehingga diharapkan ada peningkatan aspek keselamatan melalui mitigasi risiko baik dari faktor kendaraan, jalan serta manusianya.

“Webinar Diskusi Virtual ini menyinergikan antara pemikiran pemerintah, upaya operator, sekalipun dalam bentuk virtual. Kita tahu bahwa transportasi penting dan memiliki peran dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan perjalanan. Pentingnya peranan transportasi tersebut tentunya diimbangi dengan keterlibatan / partisipasi aktif dari pihak – pihak yang terkait di dalamnya,” kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat menjadi *keynote speaker* dalam webinar tersebut.

Menyambung yang disampaikan oleh Menhub, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam sambutannya, menyatakan adanya beberapa hasil analisis dan evaluasi yang disampaikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengenai kecelakaan bus dan truk.

“Sebagian besar kecelakaan diakibatkan oleh faktor manusia, yaitu karena penguasaan kendaraan dan medan yang belum maksimal. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia mengakibatkan

SINERGI PEMERINTAH-OPERATOR WUJUDKAN ANGKUTAN YANG BERKESELAMATAN

Keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi adalah salah satu hal yang penting, sehingga diperlukan kerjasama antara Pemerintah maupun Operator dalam mewujudkannya. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama dengan sejumlah praktisi dan pengamat transportasi membahas hal tersebut dalam webinar dengan tema “Sinergi Pemerintah dan Operator dalam Mewujudkan Angkutan yang Berkeselamatan”.



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan *keynote speech* pada Webinar “Sinergi Pemerintah dan Operator dalam Mewujudkan Angkutan yang Berkeselamatan”

setiap 1 jam ada 2-3 orang yang meninggal dunia. Untuk melakukan perbaikan ini semuanya butuh kerjasama semua pihak,” kata Dirjen Budi.

Ada beberapa pihak yang dirasa cukup berpengaruh dalam menciptakan Angkutan yang Berkeselamatan. Yang pertama,

yaitu pengguna jasa transportasi (*user*), dimana masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi harus memberikan kontribusi yang maksimal terhadap ketersediaan sarana transportasi. Pihak kedua, yaitu pemilik dan pengelola (*operator*), yang diharapkan mampu memberikan pelayanan dan pengadaan sarana transportasi

secara optimal. Sementara pihak terakhir adalah regulator, dimana dalam hal ini pemerintah sebagai pengatur sistem transportasi, berperan memberi dan mengeluarkan kebijakan bagi pihak *user* dan operator dalam sistem transportasi tersebut.

“Kecelakaan truk dan bus adalah yang terbesar ke 3 setelah sepeda motor (Data IRSMS 2018), walaupun tidak sebesar kecelakaan sepeda motor yang sampai 72%. Namun kalau kecelakaan melibatkan bus pasti jumlah korbannya cukup banyak misalnya yang terjadi di Sumedang dan Cikidang. Tingkat fatalitas kecelakaan di Indonesia dibandingkan Eropa dan Amerika yang grafiknya menurun, justru Indonesia mengalami peningkatan,” jabar Dirjen Budi.

Berdasarkan data, ada beberapa penyebab kecelakaan secara umum yang pernah terjadi di Indonesia yaitu akibat Speleng Kemudi yang terjadi pada kecelakaan bus Simpati Star Jalan Medan-Aceh (22 Desember 2017), *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang terjadi di Tol Cipali KM 113+200 (1 Desember 2019), akibat Pecah Ban yang terjadi di Cipali (21 Maret 2014), Rem Blong di Tikungan Emen Subang (10 Februari 2018), dan Patah Rangka terjadi tabrakan truk di Batam (14 September 2013).

“Meningkatkan aspek keselamatan



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi memberikan sambutan pada Webinar “Sinergi Pemerintah dan Operator dalam Mewujudkan Angkutan yang Berkeselamatan”, 20/4/2021

menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini adalah kata kuncinya, jangan kita saling menyalahkan, marilah kita menyampaikan bersama. Kami sampai saat ini juga masih butuh masukan jika memang belum maksimal dalam menerapkan 5 (lima) pilar aksi keselamatan jalan yaitu Manajemen Keselamatan Jalan, Jalan Yang Berkeselamatan, Kendaraan Yang Berkeselamatan, Perilaku Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan, dan Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menhub,” urai Dirjen Budi.

Untuk mewujudkan Angkutan yang Berkeselamatan, Ditjen Hubdat telah melakukan pengawasan terhadap:

1. Keberadaan angkutan ilegal (Travel gelap dan bus tidak berizin),
2. Bus antar kota yang tidak masuk terminal,
3. Bus pariwisata yang tidak

diwajibkan masuk terminal, 4. Truk ODOL.

“Saat ini kami dari Pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya, tinggal bagaimana operator melaksanakan regulasi ini. Mudah-mudahan ini dapat segera diimplementasikan oleh kita sehingga aspek keselamatan kendaraan barang dan bus semakin baik di Indonesia,” kata Dirjen Budi.

Sementara itu, Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Ahmad Wildan, mengusulkan 2 jenis mitigasi yaitu *Active Safety* dan *Passive Safety*. “Untuk *Active Safety* dengan me-review regulasi terkait rancang bangun kendaraan bermotor, kemudian harus mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), mendorong tiap karoseri memiliki *training center*, dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) wajib mengaudit karoseri. Sementara *Passive Safety* dengan Program *Emergency Response Plan* atau Program Pelatihan Keadaan Darurat,” jelasnya.

Turut hadir sebagai pemateri dan pembahas dalam webinar ini yaitu Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat, Ahmad Yani, Akademisi/ Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, Ketua MTI, Prof. Agus Taufik Mulyono, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, Perwakilan PO Sumber Alam, Anthony Stephen Hambali, dan Perwakilan PT. Lookman Djaja Logistics, Kyatmaja Lookman.*



Pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk bermuatan gandum bernomor polisi K 8034 OE pada Sabtu (19/6) lalu tepatnya di jalan raya Ajibarang – Tegal, Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menggelar rapat koordinasi yang membahas isu keselamatan angkutan barang di Aula Pelabuhan Tanjung Intan, Pelindo 3 Cilacap (21/6/2021).

“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah menanggapi sering terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang kemarin baru saja terjadi truk bermuatan gandum yang melaju kencang dari arah selatan menuju utara dan diperkirakan mengalami rem blong sehingga perlunya identifikasi lebih dalam terkait keselamatan angkutan barang ini,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Perlu diketahui berdasarkan data persebaran barang dari dan menuju Cilacap terdapat 7 (tujuh) jenis komoditas yang diangkut dengan angkutan barang yakni meliputi aspal curah, tapioka, batubara, gandum, pupuk, semen, dan gula rafinasi.

“Namun kalau kita perhatikan masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat *human error* selain itu juga faktor pengemudi yang belum mengenal karakter jalan yang dilaluinya,” tutur Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi ada beberapa hal yang harus ditingkatkan salah satunya pengawasan yang dilakukan di setiap Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau yang disebut Jembatan Timbang. “Karena beberapa pengemudi sengaja tidak melalui Jembatan Timbang sebab apabila diketahui petugas melanggar batas dimensi dan berlebih muatan maka akan segera ditindak,” jelas Dirjen Budi.



Truk bermuatan gandum yang mengalami kecelakaan di jalan raya Paguyangan-Bumiayu, tepatnya selepas Flyover Kretek, Desa Pagojengan, Kecamatan Gaguyangan, Kabupaten Brebes, Sabtu (19/6/2021). Foto: iNews/Yunibar.

IDENTIFIKASI KESELAMATAN ANGKUTAN BARANG

Berdasarkan investigasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), diketahui bahwa kecelakaan angkutan barang awalnya terjadi karena rem blong.

la memberi contoh misalnya truk gandum yang mengalami kecelakaan tersebut berdasarkan pencatatan arus penimbangan shift ke-2, Hari Jumat 18 Juni 2021 dari pukul 20.00 - 08.00 WIB kendaraan TIDAK MASUK di UPPKB Ajibarang serta melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 06 Tahun 2019 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalur Ajibarang – Prupuk (Larangan melintas *Fly Over* Kretek Bumiayu).

Selain itu, Dirjen Budi mengatakan berkaitan dengan *Over Dimension* (*ODOL*), Ditjen Perhubungan Darat bersama dengan beberapa pihak seperti Kepolisian, Kementerian PUPR, dan BPJT sudah sepakat untuk mengentaskan pelanggaran kendaraan *ODOL* sampai tahun 2023.

“Saya berharap ke depannya agar kita bersama-sama dapat

membangun tingkat kesadaran operator termasuk pemilik logistik barang bahwa muatan berlebih kendaraan yang over dimensi sangat berbahaya bagi aspek keselamatan yang dapat merugikan banyak pihak. Saya ingin tidak terjadi kembali kecelakaan yang disebabkan *ODOL*, peran kita semua sebagai pengguna jalan yaitu mematuhi regulasi yang ditetapkan,” tutup Dirjen Budi.

Rawan Kecelakaan Lalu Lintas
Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, beranggapan bahwa dalam prakteknya truk *ODOL* dari sejumlah armada truk yang berasal dari Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan, kerap terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan layang (*fly over*) Kretek di Bumiayu. *Fly over* (*FO*) Kretek sepanjang 830 meter dibangun dalam rangka menghilangkan perlintasan sebidang



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Ketua KNKT Soerjanto ketika menggelar rapat koordinasi yang membahas isu keselamatan angkutan barang di Aula Pelabuhan Tanjung Intan, Pelindo 3 Cilacap (21/6/2021). Foto: HMS DJPD/BYU

dengan jalan rel. Dalam waktu bersamaan dibangun 3 *fly over* yang lain, yakni *FO* Dermoleng (650 meter), *FO* Klonengan (1.011 meter), dan *FO* Kesambi (470 meter)

“Pengemudi truk tidak mengenal karakter *fly over* Kretek dalam mengendarai kendaraan. Sejak *fly over* Kretek difungsikan tahun 2017 telah menelan korban 35 orang meninggal dunia dan sekitar 200an orang mengalami luka berat (cacat permanen),” kata Djoko.

Menurutnya jenis komoditi yang melintas di *fly over* Kretek selain komoditi yang berasal dari Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan, masih ditambah barang bekas, pasir putih, dan kayu dari daerah lain di luar Kab. Cilacap.

Saat ini sudah terbangun dua jalur penyelamat yang berjarak 200 meter dari batas akhir *fly over* Kretek dan 500 meter setelah jalur penyelamatan pertama mendekati jalan lingkar (*ringroad*) Bumiayu (Kab. Brebes). Namun belum menjamin daerah ini akan bebas dari kecelakaan lalu lintas. Bahaya akan kecelakaan lalu lintas akan selalu mengincar selama truk *ODOL* masih beroperasi.

Audit keselamatan *fly over* Kretek sudah dilakukan dan hasilnya belum diketahui umum. Aliansi *Save Fly Over* Kretek binaan masyarakat Bumiayu sangat

berharap tidak akan terjadi lagi kecelakaan lalu lintas di sekitar *fly over* Kretek.

Pemberantasan Pungli dan Truk ODOL Dimulai dari Pelabuhan Tanjung Intan

Di sekitar Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan, ada sejumlah aktivitas bisnis, seperti PT Pelindo III Tanjung Intan Cilacap, PT Dharma Usaha Sukses, PT Juifa Internasional Foods, PT Manunggal Perkasa, PT Pertamina RU IV Cilacap, PT Sumber Segara Prima-daya, PT Solusi Bangun Indonesia, PT Toxindo Prima. Waroeng Batok Industri. Perusahaan tersebut jika menggunakan armada truk, rata-rata memuat lebih.

Sejumlah armada truk yang berada di penampungan sementara memiliki dimensi berlebih (*over dimension*). Dapat dipastikan semua armada truk yang jumlahnya ratusan unit beroperasi di Pelabuhan Tanjung Intan tidak memiliki surat lolos uji laik jalan (*kir*).

Berdasarkan data persebaran barang dari dan menuju Cilacap terdapat tujuh jenis komoditas yang diangkut dengan angkutan barang, yakni aspal curah, tepung tapioka, batubara, gandum, pupuk, semen dan gula rafinasi. Pelabuhan Tanjung Intan sudah memiliki fasilitas penimbangan kendaraan. Namun hanya digunakan untuk menimbang kendaraan yang akan *loading*.

Alur pungutan liar dan truk *ODOL* di Pelabuhan Tanjung Intan dimulai dari truk berada di penampungan sementara - menunggu antrian (bisa dalam jam atau hari) - tidak terdapat fasilitas memadai bagi pengemudi - pada saat *loading* barang menggunakan pengemudi tembak - membawa kendaraan keluar dari kawasan.

“Dalam sehari lebih dari 300 armada truk *ODOL* keluar dari Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan. Transaksi pungli paling sedikit sekitar Rp 7 miliar per bulannya di kawasan pelabuhan ini,” ungkap Djoko.

Selama ini, Ditjen Hubdat sudah berupaya untuk melakukan penindakan terhadap praktek truk *ODOL* namun tidak menunjukkan hasil yang berarti (*signifikan*), jika pemberantasan itu hanya dilakukan oleh Ditjen Hubdat tanpa ada upaya penegakan hukum di jalan raya oleh Polri. Harus diakui selama ini penegakan hukum di jalan raya masih sangat lemah.

Terlebih di masa pandemi, tidak dilakukan tindak pelanggaran (*tilang*) terhadap truk *ODOL* yang berlalu-lalang di jalan raya. Dengan dibiarkan seperti sekarang, telah terjadi pembiaran yang sudah kronis. Saat ini, truk memuat muatan lebih dengan dimensi yang berlebihan sudah dianggap hal biasa.

Djoko berpendapat Polri mestinya turut mendukung penegakan hukum (*gakkum*) di jalan raya, karena ini kewenangannya. Jika penegakan hukum gencar dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, niscaya pungli dan truk *ODOL* pasti akan berkurang dan berakhir.

Di sisi lain, setiap pengusaha pemilik barang diwajibkan untuk membuat perjanjian dalam dokumen kontrak dengan pengusaha jasa angkutan (*transporter*) untuk tidak menggunakan truk *over* dimensi, serta tidak menggunakan truk yang tidak memiliki surat lolos uji laik jalan (*kir*).(*)

Kajian Bappenas bersama Bank Dunia (2019), antara lain menyebutkan pangsa angkutan umum Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya rata-rata kurang dari 20 persen. Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung masuk dalam kota termacet di Asia. Kota Jakarta menduduki peringkat 10 dengan 53 persen tingkat kemacetan dibandingkan kondisi normal atau tidak macet di kota tersebut. Keterbatasan sistem angkutan umum massal menyebabkan kemacetan yang akhirnya berdampak pada kerugian ekonomi. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya berdampak pada peningkatan 1,4 persen PDB per kapita. Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Pada 5 wilayah metropolitan (Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar) kerugian mencapai Rp 12 triliun per tahun.

Saat ini, payung hukum untuk pembangunan proyek angkutan massal perkotaan (termasuk dalam hal dukungan Pemerintah), masih belum menyeluruh atau bersifat untuk masing-masing proyek (*arbitrary*). Dukungan pusat, misalnya, LRT Sumatera Selatan 100 persen, MRT Jakarta 49 persen, LRT Jabodetabek berupa sinergi BUMN (PT Adhi Karya, PT Inka, dan PT Kereta Api Indonesia). Selain DKI Jakarta, tidak ada kota yang mampu membangun MRT dan LRT jika hanya mengandalkan APBD.

Untuk mengimplementasi kebijakan pengembangan angkutan umum massal perkotaan, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) terkait Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.

Rancangan Perpres antara lain mengatur kebijakan mobilitas perkotaan dan pengembangan



Membangun Transportasi Perkotaan

Oleh : Djoko Setijowarno

Tidak berkembangnya transportasi umum perkotaan, akar masalahnya adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk membangun sistem angkutan umum massal perkotaan. Keterbatasan kelembagaan/otoritas yang mampu mengintegrasikan pengembangan transportasi perkotaan lintas administrasi dan lintas sistem angkutan di kawasan metropolitan.



kelembagaan dan dukungan fiskal, termasuk (1) kriteria untuk dapat memperoleh dukungan (termasuk syarat kelembagaan otoritas transportasi kawasan metropolitan) dan ruang lingkup, skema, serta bentuk dukungan pendanaan Pemerintah Pusat dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Menurut Bappenas (2021), ada 7 alasan mengapa perlu diterbitkan Perpres Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan?

Pertama, kontribusi metropolitan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Hal ini terutama dipengaruhi kemacetan

akibat kurangnya pelayanan angkutan umum massal. Kedua, Biaya awal pembangunan angkutan umum massal perkotaan sangat besar. Selain itu, angkutan massal biasanya juga tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk biaya operasional dan perawatan.

Ketiga, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pembangunan angkutan umum berada di Pemda dan terbatas pada satu wilayah administrasi. Namun, Pemda selain DKI Jakarta terkendala keterbatasan fiskal dan kelembagaan, sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Pusat. Keempat, Saat ini belum ada aturan yang me-

mungkinkan Pemerintah Pusat memberikan dukungan fiskal kepada Pemda untuk angkutan massal, kecuali KPBU. Dukungan 49% Capex (dalam aturan KPBU) tidak mencukupi untuk angkutan massal, sehingga sampai saat ini belum ada proyek KPBU angkutan massal.

Kelima, selama ini, angkutan umum massal di Indonesia dilakukan melalui investasi Pemerintah dengan mekanisme *ad hoc*, hasilnya kurang optimal. Contohnya MRT hanya terbatas di Jakarta; LRT Sumatera Selatan melalui APBN berdasarkan Perpres Penguasaan (dampaknya tidak terintegrasi dan Pemda tidak mampu mengoperasikan); LRT Jabodetabek melalui pendanaan BUMN berdasarkan Perpres Penguasaan.

Keenam, investasi swasta dalam angkutan umum massal sangat terbatas, umumnya pada pengadaan sarana, pengoperasian dan perawatan. Investasi swasta sangat terbatas antara lain karena pengelola angkutan swasta tidak mempunyai kemampuan memengaruhi *demand* angkutan umum, konsesi angkutan perkotaan cukup rumit, karena tiap kota mempunyai kebijakan yang tidak sama, dan terbatasnya operator yang mempunyai kapasitas keuangan yang cukup untuk mengelola angkutan.

Ketujuh, diperlukan Peraturan Presiden yang memungkinkan Pemerintah Pusat mendukung biaya investasi awal yang diperlukan. Tanggung jawab Pemda berupa menanggung sebagian

investasi awal, kekurangan biaya operasi dan perawatan serta menjamin terjadinya integrasi layanan antar moda dan antar wilayah kota metropolitan. Investasi pemerintah untuk biaya modal dan biaya operasi angkutan umum dilakukan banyak negara dan mempunyai alasan yang kuat untuk proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan sosial-ekonomi yang besar.

Mulai implementasi Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan (pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Untuk mengimplementasikan transportasi umum perkotaan, diterbitkan PM Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan. Angkutan massal Perkotaan merupakan *public goods*, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Program *Buy the Service* (BTS) dilakukan dengan membeli layanan (memberikan subsidi 100%) dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Di samping itu, pemda juga harus berperan untuk menjaga keberlangsungan program ini. Pertama, pembuatan halte. Halte dapat berupa *bus stop*, halte eksisting (revitalisasi) atau kerjasama dengan pihak swasta (CSR atau memanfaatkan halte sebagai media iklan). Kedua,

melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat berupa kesadaran untuk kembali ke angkutan umum serta tata cara menggunakan angkutan umum. Ketiga, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan *push strategy* seperti pembatasan ruang (ganjil genap) atau waktu (*bus priority in peak hour*) atau kebijakan lain yang berpihak ke angkutan umum. Keempat, daerah diharapkan melakukan survey kondisi lalu lintas sebelum, saat dan sesudah dilaksanakannya BTS untuk didapat data yang akurat sebagai dasar evaluasi kemanfaatan program.

Kelima, Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat bersama Pemerintah Pusat untuk sama-sama mendukung program sebagaimana dimaksud serta melihat dampak ekonomi serta lingkungan yang dapat tercipta.

Tahapan implementasi sudah dimulai tahun 2020 untuk di lima kota, yaitu Medan (Trans Metro Deli melayani 5 koridor dan 72 bus, 345 titik halte), Palembang (Trans Musi Jaya melayani 4 koridor, 66 bus, 151 titik halte), Yogyakarta (Trans Jogja melayani 3 koridor, 44 bus, 113 titik halte), Solo (Batik Solo Trans melayani 4 koridor, 6 feeder, 90 bus, 105 MPU, 828 titik halte) dan Denpasar (Trans Metro Dewata melayani 4 koridor, 105 bus, 186 titik halte). Bus beroperasi selama 17 jam mulai jam 05.00 hingga 22.00.

Tahun 2021 akan diimplementasikan di enam kota, yaitu Bogor (6 koridor), Banjarmasin (4 koridor, 77 armada bus, 195 titik halte), Purwokerto (3 koridor, 58 armada bus, 185 titik halte), Makassar (3 koridor, 86 armada bus, 261 titik halte), Bandung (5 koridor, 103 armada bus, 240 titik halte), Surabaya (6 koridor, 132 armada bus, 366 titik halte).(*)

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat



INDONESIA BEBAS ODOL 2023 DALAM WEBINAR INTERNASIONAL

Beberapa upaya untuk mengurangi aktivitas kendaraan ODOL adalah dengan melarang kendaraan berlebih muatan dan dimensi tersebut memasuki jalan tol juga dengan memaksimalkan pengoperasian UPPKB di jalan nasional, selain itu juga dengan melakukan normalisasi terhadap kendaraan truk yang *over dimensi*.



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan sambutan pembukaan pada Webinar Internasional "Benchmarking On The Regulation And Policy On Overdimension And Overloading Trucking Against Other Countries", 3/6/2021.

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan sejumlah cara untuk dapat mewujudkan Indonesia Bebas *Over Dimensi* dan *Over Loading* (ODOL) pada 2023 mendatang. Berkaitan dengan itu Kementerian Perhubungan menggelar webinar internasional dengan topik "Benchmarking On The Regulation And Policy On Overdimension And Overloading Trucking Against Other Countries" pada Kamis (3/6) malam.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi yang

hadir mewakili Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa salah satu tantangan dari kehadiran kendaraan angkutan barang di Indonesia adalah upaya untuk mengurangi kendaraan ODOL. Sampai dengan November tahun 2019, berdasarkan hasil dari *monitoring* truk angkutan barang di 73 UPPKB, ada sekitar 2.073.698 kendaraan yang masuk UPPKB, yang mana 39% atau sebanyak 809.496 unit truk yang melanggar.

"Pelanggaran terbanyak yang ditemukan adalah pada truk

over loading, sebesar 84,43%. Truk ODOL ini menimbulkan biaya sosial yang cukup besar, di antaranya yaitu biaya bahan bakar tinggi, berkontribusi besar pada kerusakan jalan, bahkan polusi dan kecelakaan. Seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan laporan Kementerian PUPR, dalam satu tahun kerugian negara akibat truk ODOL mencapai Rp 43 triliun," kata Dirjen Budi dalam sambutan pembukanya.

Menurutnya, saat ini angkutan jalan masih menjadi primadona kegiatan logistik dengan moda sharing sebesar 90,4%. Beberapa upaya untuk mengurangi aktivitas kendaraan ODOL adalah dengan melarang kendaraan berlebih muatan dan dimensi tersebut memasuki jalan tol juga dengan memaksimalkan pengoperasian UPPKB di jalan nasional. Upaya ini juga ditujukan untuk keselamatan dan mengalihkan sebagian angkutan jalan ke moda lain seperti angkutan kereta dan angkutan laut.

"Upaya lain sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan pelaku ODOL, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Pemerintah Daerah telah melakukan upaya serius, diantaranya normalisasi kendaraan truk *over dimensi*. Selain itu, inovasi dalam bentuk pemulihan keadilan bagi pelaku yang berniat baik untuk mengembalikan kendaraannya ke kondisi semula pada bengkel resmi juga sedang digalakkan. Ditargetkan Indonesia dapat bebas ODOL pada tahun 2023," jabar Dirjen Budi.

Berdasarkan fakta tersebut, diharapkan Pemerintah dapat menemukan formula regulasi yang tepat menangani truk ODOL yang tidak kontradiktif dengan dunia industri, sehingga Indonesia dapat menyamai negara-negara lain yang sudah mencapai *zero ODOL*. "Tentunya Kementerian

Perhubungan tidak dapat mewujudkannya tanpa kerjasama dengan pemerintah dan mitra terkait. Kementerian Perhubungan mengajak semua pihak, mulai dari pelaku usaha, operator angkutan, hingga pemilik barang untuk menaati aturan yang ditetapkan pemerintah untuk kebaikan bersama," tambah Dirjen Budi.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Suharto menyampaikan salah satu upaya untuk mencapai *zero ODOL 2023* dapat diraih melalui webinar internasional ini yang dapat memberikan pemahaman dalam mengatur pengoperasian kendaraan angkutan barang di jalan dengan tolok ukur dari pengalaman implementasinya di negara-negara lain.

"Hal ini sangat penting agar sistem angkutan barang kita mengikuti kebijakan standar keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu kita perlu memahami regulasi nasional dan internasional saat ini. Saya yakin bahwa partisipasi aktif dan kontribusi anda akan memberikan hasil yang substansial terhadap upaya kami dalam meningkatkan pengaturan terhadap kendaraan ODOL. Saya berharap bahwa sinergi dan kerjasama yang saling menguntungkan serta



Pemaparan materi Mr. Duane Pearce dari Departemen Transportasi Maryland, Amerika Serikat



Webinar Internasional "Benchmarking On The Regulation And Policy On Overdimension And Overloading Trucking Against Other Countries" menghadirkan pembicara dari Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, dan Perancis.

kolaborasi antara Indonesia, USA, Korea Selatan, Thailand, Perancis dan semua pemerintahan, pengusaha angkutan barang dan pihak-pihak yang terlibat, saya berharap kerjasama kita akan terus berlanjut," kata Suharto.

Dalam pemaparan materinya, Mr. Duane Pearce dari Departemen Transportasi Maryland, Amerika Serikat, menyampaikan bahwa dalam ketentuan di Maryland, berlaku ketentuan maksimum lebar kendaraan yaitu 102 inci dengan maksimum tinggi sekitar 13 kaki 6 inci. Sementara ketentuan berat kendaraan yaitu 20.000-22.400 pon untuk kendaraan sumbu tunggal, 34.000 pon untuk sumbu dua, dan 80.000 pon untuk traktor dan trailer sumbu 5. Jika terbukti melanggar, akan dikenakan denda sebesar 1 sen USD per 1 pon kelebihan dalam 1.000 pon pertama berat di atas berat yang diizinkan. Denda

sebesar 5 sen USD akan dikenakan per pon jika kelebihan muatan antara 1.000-5.0001 pon, dan denda 12 sen per pon USD jika kelebihan antara 5.000-10.001 pon. Untuk kelebihan antara 10.000-20.001 pon akan didenda sebesar 20 sen USD per pon dan akan dikenakan denda sebesar 40 sen USD untuk setiap pon yang melebihi muatan 20.000 pon.

Melalui penjelasan dari Ms. Sue Park, General Manager ITS Korea Selatan, jika di Korea Selatan akan berlaku ketentuan pelanggaran yaitu sekitar 1 tahun penjara atau denda di bawah 10 juta Won atau sekitar 10.000 USD. Pelanggaran ini berlaku bagi pelanggar yang memanipulasi alat dalam kendaraan atau tidak mematuhi ketentuan beban.

Pembicara lain yang turut hadir yakni Mr. Suratin Tunyaplin, Managing Director, Suwanpisarn Transportation Co.Ltd 2010, Thailand yang menyampaikan tentang beberapa jenis truk dan standar pengukuran yang berlaku di Thailand. Ia juga menyampaikan sejumlah perbandingan peraturan mengenai ketentuan muatan angkutan barang yang berlaku di Thailand dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Laos, Kamboja, dan Malaysia.

Selain itu ada juga Mr. Michel Savy, Distinguished Professor dari Universite Paris Est - France yang memaparkan tentang ketentuan yang berlaku mengenai ODOL di Perancis. (*)

Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan *Road Map* (Peta Jalan) dalam rangka mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.

“*Road Map* ini telah kami koordinasikan dengan Kemkomarvest. Minggu depan akan kita presentasikan dalam satu diskusi yang lebih detail, sehingga bisa dijadikan pedoman atau patokan bagi *stakeholder* terkait,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, di Jakarta, Rabu (19/5).

Menhub menyampaikan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub untuk mendorong percepatan program KBLBB di Indonesia. Diantaranya yaitu: menerbitkan beberapa regulasi, menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasional Kemenhub, mendorong angkutan umum seperti: Transjakarta, Damri, Angkutan Bandara untuk menggunakan Bus dengan tenaga listrik, dan mendorong penggunaan bus listrik melalui Program Buy The Service (BTS) di beberapa kota.

Selain itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan sejumlah langkah diantaranya yaitu: merencanakan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pada 3 (tiga) Kota Percontohan di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali.

“Kendaraan listrik juga bisa menjadi preferensi bagi Indonesia menjadi negara pengekspor kendaraan listrik, dan kita punya Pelabuhan Patimban yang sangat terbuka untuk



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pameran kendaraan listrik di Stasiun Kereta Api Bekasi Timur, 18/4/2021. Foto: istimewa

ROADMAP KENDARAAN LISTRIK

dilakukan pengembangan industri mobil listrik. Karena memiliki *car terminal* yang memang diprioritaskan untuk melakukan ekspor ataupun antarkota,” tutur Menhub.

Menhub berharap dukungan dari *stakeholder* terkait untuk bersama-sama menjadikan kendaraan listrik sebagai kebutuhan massal di Indonesia. Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk menyediakan tempat pengisian (*charging*) di simpul-simpul transportasi yaitu di stasiun kereta api di Jakarta.

Lebih lanjut Menhub memberikan apresiasi kepada para pelaku

industri otomotif dalam negeri yang sudah mulai memproduksi kendaraan listrik, dimana pemerintah telah mendukung pengembangan industri kendaraan listrik buatan dalam negeri dengan memerhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat membuka banyak lapangan kerja.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang juga selaku Ketua Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenhub untuk mendorong percepatan program KBLBB di Indonesia. Diantaranya yaitu membuat *Road Map* sebagai

transisi penggunaan kendaraan listrik yang akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri.

“Kita semua harus yakin bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang cepat dan bijak dalam memutuskan bagaimana pembangunan kendaraan listrik harus segera terwujud dengan baik. Karena ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia khususnya Presiden Indonesia atas protocol Paris untuk mereduksi gas CO2 dan polusi dengan penggunaan bus listrik, mobil/motor listrik, dan sepeda listrik,” jelas Moeldoko.

Turut hadir Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia G.L. Kalake, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Upaya Mendorong Kendaraan Listrik Menjadi Kebutuhan Massal

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengupayakan kendaraan listrik di Indonesia menjadi kebutuhan massal. Hal itu disampaikan Menhub saat mengunjungi



pameran kendaraan listrik yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Darat bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dan komunitas pegiat kendaraan listrik di Stasiun KA Bekasi Timur, Minggu (18/4).

“Kita ingin kendaraan listrik ini bisa menjadi kebutuhan massal. Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, telah mengamanatkan bahwa kita harus mengarah ke penggunaan kendaraan listrik,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, Kemenhub telah menindaklanjuti Perpres tersebut dengan membuat sejumlah regulasi tentang kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur antara lain: pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik, kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai, dan sejumlah regulasi lainnya yang tengah disusun.

“Kami juga akan membuat Peta Jalan (*Road Map*). Dimana pada tahun 2030 ditargetkan kendaraan listrik sudah signifikan digunakan oleh masyarakat banyak,” ucap Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan sejumlah upaya lain yang telah dilakukan yaitu: mendorong penggunaan bus listrik melalui Program Buy The Service (BTS) di

beberapa kota seperti : Bali, Surabaya, Bandung, Surabaya, dan Medan. Program BTS dilakukan dengan membeli layanan dengan subsidi 100% dari operator dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Sebagai tahap awal, penggunaan transportasi ramah lingkungan ini akan dimanfaatkan untuk angkutan transportasi seperti Transjakarta maupun Damri dan sebagainya sebagai angkutan perkotaan.

Selain bus, Kemenhub juga mendorong penggunaan kendaraan listrik pada kendaraan taksi dan sepeda motor.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Dirut PLN untuk membangun lebih banyak lagi titik-titik stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis baterai,” tutur Menhub.

Kemudian, Menhub dan jajaran Eselon I di lingkungan Kemenhub juga sudah menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan kedinasan. Menhub mendorong Kementerian dan Lembaga lain juga menggunakan kendaraan listrik agar penggunaannya semakin masif.

Dengan mengurangi penggunaan BBM yang semakin lama produksinya terus menurun sementara permintaan terus meningkat, diharapkan penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan pilihan masyarakat yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas udara di Indonesia.(*)

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menghadirkan Unit Pemeriksa Laik Fungsi Kendaraan Bermotor Non Statis atau disebut Kendaraan Uji Keliling yang diperuntukkan agar mempermudah uji berkala khususnya di daerah yang belum memiliki Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi, salah satunya yang berada di Sulawesi Utara.

“Dengan mempergunakan mobil uji keliling merupakan upaya pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pengujian berkala kendaraan bermotor pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang telah berlangsung cukup lama,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam acara Peresmian Kendaraan Uji Keliling di Terminal Tipe A Tangkoko Bitung, Sabtu (10/4).

Lanjutnya, Ia mengatakan permasalahan tersebut dikarenakan UPUBKB yang ada di Kabupaten/Kota tidak atau belum terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Namun demikian bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang nantinya akan dilayani dengan mobil uji keliling ini diharapkan dapat membangun UPUBKB yang baik, memelihara peralatan ujinya secara teratur, melakukan kalibrasi setiap tahun, meningkatkan kompetensi para pengujinya, serta mengajukan permohonan akreditasi terhadap UPUBKB daerahnya masing-masing,” jelas Dirjen Budi.

Selain itu Dirjen Budi mengungkapkan, apabila melihat kondisi saat ini jumlah UPUBKB yang terakreditasi masih sangat terbatas di beberapa wilayah di Indonesia. “Oleh karena

KENDARAAN UJI KELILING PERMUDAH UJI BERKALA

Dengan mempergunakan mobil uji keliling merupakan upaya pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pengujian berkala kendaraan bermotor pada beberapa Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

itu saya sangat mendukung program pemenuhan fasilitas dan peralatan untuk pengujian berkala kendaraan bermotor berupa kendaraan uji keliling. Sehingga pelayanan uji berkala masih dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien,” jelas Dirjen Budi.

Dengan adanya Kendaraan Uji Keliling ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk terus berupaya melakukan percepatan dalam peningkatan kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dan keselamatan lalu lintas jalan, termasuk mendukung Program Menuju Indonesia Zero ODOL (*Over Dimension Over Loading*) Tahun 2023.

Tindak Tegas Truk Odol

Pada kesempatan tersebut Dirjen Budi turut melakukan normalisasi terhadap 1 (satu) unit truk ODOL merek HINO yang melanggar batas tinggi dan panjang bak yakni tinggi bak eksisting : 1.800 mm, seharusnya ukuran standar : 1.200 mm, kelebihan : 600 mm, selain itu panjang bak eksisting: 4.880 mm, seharusnya ukuran standar : 4.250 mm, kelebihan : 630 mm.

“Berdasarkan arahan pak Menteri Perhubungan, kami sudah memiliki *road map* sampai tahun 2023 terkait penanganan ODOL, makanya setiap minggu saya ke tiap daerah untuk melakukan



normalisasi. Namun banyak kasus di Sulut ini paling banyak terkait pelanggaran tinggi dan panjang bak. Dalam hal ini saya mengimbau kepada para operator untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” kata Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga membahas hadirnya kendaraan uji keliling dan sanksi seperti transfer muatan dapat memperketat pengawasan dan memberi efek jera kepada pelanggar.

Mendukung pernyataan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Herson Mayulu mengatakan, “Inilah yang sering membuat jalan rusak yaitu ODOL, oleh karena itu harus dilakukan penindakan kepada kendaraan yang besar-besar itu karena merusak infrastruktur jalan yang ada.”

Turut hadir dalam acara ini yaitu Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah, Kepala BPTD Wilayah XXII Sulawesi

Atas: Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan pemotongan kendaraan yang over dimensi dengan menggunakan blender di Terminal Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara, 10/4/2021. Bawah: Penandatanganan Deklarasi Mendukung Pelaksanaan Zero ODOL di Provinsi Sulawesi Utara. Foto: HMS DJPD/MAD



Utara, Renhard Ronald, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Daniel

Mewengkang, dan Walikota Bitung, Maurits Mantiri.(*)

Peningkatan kualitas dan pelayanan Terminal Tipe A terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Kenyamanan para penumpang adalah salah satu hal yang ingin dicapai dalam pembenahan Terminal Tipe A. Oleh karena itu, pada Sabtu (10/4), diadakan Launching Terminal Tipe A Tangkoko Bitung sebagai "Terminal Serasa Bandara" oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi yang didampingi oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah.

Melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, Ditjen Hubdat melakukan sejumlah pembenahan di Terminal Tipe A Tangkoko Bitung untuk mewujudkan kondisi "Terminal Serasa Bandara" tersebut.

"Pada prinsipnya kehadiran Pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semenjak 2018, sebanyak 125 Terminal Tipe A di Indonesia sudah diserahkan ke Pemerintah Pusat yaitu Kemenhub. Pada hari ini kita meresmikan Terminal Tipe A Tangkoko Bitung sebagai "Terminal Serasa Bandara". Menurut saya ini memang sudah seperti bandara," kata Dirjen Budi dalam sambutannya di Terminal Tipe A Tangkoko Bitung.

Menurutnya, terminal memang tidak perlu terlalu besar tapi yang terpenting fasilitas dan pelayanannya dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. "Kalau membangun terlalu luas memang akan boros anggaran sementara APBN terbatas. Saat ini kami membuat skema-skema kerjasama untuk terminal sehingga dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta," jelasnya lagi.

Dalam penjelasannya tersebut ia



TERMINAL TIPE A TANGKOKO, BITUNG, TERMINAL SERASA BANDARA

"Menurut saya untuk wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi yang terindah terminalnya memang di Tangkoko. Selamat kepada masyarakat di Bitung karena sudah memiliki terminal yang serasa bandara," ujar Dirjen Budi.

juga menjelaskan bahwa berikutnya sangat terbuka sekali dengan konsep terminal, sehingga tidak hanya sebagai tempat naik turunnya penumpang saja tapi juga harus memberikan efek ekonomi.

"Menurut saya untuk wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi yang terindah terminalnya memang di Tangkoko. Selamat kepada masyarakat di Bitung karena

sudah memiliki terminal yang serasa bandara," ujar Dirjen Budi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPTD Wilayah XXII Sulawesi Utara, Renhard Ronald menyatakan bahwa dalam mewujudkan pelayanan Terminal Tipe A Tangkoko Bitung yang prima dan lebih baik, pihaknya telah mengupayakan beberapa fasilitas seperti bandara.

"BPTD Sulawesi Utara telah mengupayakan pengadaan beberapa fasilitas-fasilitas pelayanan seperti yang ada di bandara, antara lain seperti ruang tunggu berpendingin udara yang dilengkapi dengan *tenant* seperti makanan dan penjual UMKM, ruang kesehatan dan laktasi, fasilitas disabilitas, ATM *gallery*, *photo booth*, mesin antrian, mesin survey kepuasan masyarakat, *free wifi* dan *port charger*, *voice direction/announcement*, dan fasilitas protokol kesehatan pencegahan Covid-19," kata Renhard.

Renhard menjabarkan juga adanya beberapa kerajinan kesenian yang semakin menambah keindahan di Terminal Tipe A Tangkoko Bitung dengan adanya lukisan mural pada tembok terminal, galeri seni di dalam terminal karya seniman lokal, serta tulisan filosofi "SI TOU TIMOU TUMOU TOU" yang artinya manusia hidup untuk memanusiaikan manusia lain.*

Samping: Terminal Tipe A Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara

Bawah: Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Anggota Komisi V DPR RI, Herson Mayulu; Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Daniel Mewengkang; dan Walikota Bitung, Maurits Mantiri ketika meresmikan Terminal Tipe A Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara, 10/4/2021. Foto: HMS DJPD/MAD



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kembali menghadirkan 1 unit kapal penyeberangan/Ro-Ro 500 GT yang akan melayani masyarakat di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peresmian kapal Ro-Ro yang diberi nama KMP. Takabonerate ini dilakukan di galangan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), Makassar pada Kamis, (22/4).

“Pembangunan kapal ini menggunakan anggaran dari APBN dengan Pagu sebesar 36 Milyar. KMP Takabonerate hadir dalam rangka mendukung kegiatan sektor perekonomian dan transportasi di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Selatan ini. Saya atas nama Pimpinan Kementerian Perhubungan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota Komisi V DPR RI atas dukungan dan pengawalannya dalam mewujudkan program khususnya pembangunan kapal untuk Kepulauan Selayar ini,” kata Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Cucu Mulyana.

Adapun spesifikasi KMP. Takabonerate yakni dengan Panjang Keseluruhan (LOA) 46,80 m, Panjang antara garis tegak (LBP) 41,56m, Lebar 12 m, Sarat air 2,60 m, dan Tinggi 3,70 m.

Kapal ini dapat memuat penumpang sebanyak 265 orang, kendaraan truk besar 10 unit, truk sedang 16 unit, roda 4 sejumlah 26 unit, dan ABK 18 orang.

Cucu juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi, kerja keras, keseriusan dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), dan PT. Indoshiptek Manajemen yang telah menyelesaikan



Sesditjen Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono; Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Cucu Mulyana; Direktur PT. ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspawati; Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras dan Hamka B Kady; (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman; Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero), Diana Rosa; serta Bupati Kepulauan Selayar meresmikan KMP. Takabonerate di galangan kapal PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), Makassar, 22/4/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

KMP. TAKABONERATE UNTUK MASYARAKAT KEPULAUAN SELAYAR

Dengan spesifikasi dan kapasitas angkut tersebut kiranya kapal ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperlancar transportasi dan konektivitas di Sulawesi Selatan serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.



pembangunan KMP. Takabonerate ini sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, sehingga performa dan stabilitas kapal saat beroperasi dapat maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan dan diharapkan.

“Kami harap perekonomian masyarakat dapat meningkat dengan adanya bantuan transportasi ini yang nantinya akan digunakan sebagai angkutan atau penghubung antar daerah. Dengan spesifikasi dan kapasitas angkut tersebut kiranya kapal ini dapat memperlancar transportasi dan konektivitas di Sulawesi Selatan serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selamat atas Peresmian Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro ini, semoga



Sesditjen Perhubungan Darat Marta Hardisarwono bersama Direktur PT. ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspawati melakukan serah terima dokumen KMP. Takabonerate, 22/4/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

kapal penyeberangan yang akan dioperasikan di Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Cucu.

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono, menyampaikan rasa terima kasihnya juga atas kerjasama dan bantuan dari Komisi V DPR RI. “Terima kasih kepada Komisi V DPR RI yang telah membuat program dan kami dapat membuat kapal. Setelah dibangun kapal oleh PT. IKI maka akan dioperasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Tinggal *maintenance* kita dari pendapatan

yang ada. Terima kasih kami sebagai wakil dari Pemerintah mendapat kapal yang bagus ini. Saya berdoa mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi orang banyak,” jabar Marta dalam kegiatan itu.

Acara ini dihadiri juga oleh Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras dan Hamka B Kady, Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira

Puspawati, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero), Diana Rosa, serta Bupati Kepulauan Selayar. (*)



KMP Takabonerate bersandar di galangan kapal PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), Makassar, Sulawesi Selatan, 22/4/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

TSDP

MENHUB TINJAU PROGRES PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN DI NUSA PENIDA BALI



Di sela-sela tinjauannya ke Bali untuk mengecek pengendalian transportasi di masa peniadaan mudik, Menteri Perhubungan Budi Karya meninjau progres pembangunan pelabuhan penyeberangan Sampalan di Nusa Penida, Bali, Sabtu (15/5), guna memastikan pembangunannya tetap berjalan meski di tengah pandemi Covid-19.

“Walaupun masa pandemi, pembangunan harus tetap berjalan. Untuk itu, di tengah kegiatan saya mengecek Pengendalian transportasi di masa lebaran ini, saya juga mengecek progres pembangunan pelabuhan di Nusa Penida yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2022,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, kehadiran pelabuhan di Nusa Penida akan menjadi kebanggaan masyarakat di Bali, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. “Kita harus bangun kebanggaan di setiap daerah, salah satunya di Bali yang merupakan destinasi wisata utama. Kita harus *support* penuh,” ucap Menhub.

Pelabuhan Penyeberangan Sampalan Nusa Penida, mulai dibangun pada tahun 2020 dan sampai saat ini progresnya sudah mencapai hampir 70 persen. Pelabuhan ini menjadi salah satu simpul transportasi laut untuk penyeberangan kapal-kapal kecil ke wilayah yang dikenal dengan segitiga emas yakni: Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan.*



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan pejabat terkait mengunjungi UPPKB Losarang, Indramayu, Jawa Barat (6/6/2021). Foto: HMS DJPD/MAD

PRASARANA

MENHUB KUNJUNGI JEMBATAN TIMBANG LOSARANG, INDRAMAYU

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi semakin meningkatnya produktivitas pemeriksaan angkutan barang tahun ini, yang dilakukan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)/Jembatan Timbang. Unit ini berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Menteri Perhubungan lantas mencontohkan pemeriksaan pada lima jembatan timbang yang berada di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kemenhub Wilayah IX Provinsi Jawa Barat. Kelima jembatan timbang tersebut adalah Balonggandu, Losarang, Kemang, Gentong dan Tomo.

Selama Januari-April 2021, pada kelima jembatan ini telah diperiksa 54.992 kendaraan, dengan tingkat pelanggaran 20.620 kendaraan (38 persen). Sebagai perbandingan, pada 2020 (Januari-Desember), di tempat yang sama telah diperiksa 63.776 kendaraan, dengan pelanggaran 36.208 kendaraan (57 persen).

“Tahun lalu diperiksa 60 ribu kendaraan. Tahun ini dalam waktu empat bulan sudah diperiksa 50 ribu kendaraan. Di akhir tahun bisa mencapai 150 ribu kendaraan yang diperiksa, dan ada kenaikan dua kali lipat. Artinya rekan-rekan telah bekerja lebih produktif,” kata Menteri Budi Sumadi meninjau Jembatan Timbang di Lo-

sarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (6/6).

Menhub menjelaskan, jembatan timbang adalah satu fungsi kontrol pergerakan logistik. Sehingga, pergerakan barang dari satu tempat ke tempat lain dapat berjalan dengan selamat dan aman.

“Kita menginginkan keselamatan dalam perjalanan. Jika kendaraan itu besaran muatannya sesuai, kemungkinan besar kendaraan akan selamat. Tetapi jika muatan melebihi, maka tingkat keselamatannya tidak terjamin,” tutur Menhub.

Menhub berharap, para pelaku usaha logistik semakin sadar untuk tidak melanggar, antara lain dengan tidak menggunakan kendaraan *over-dimensi* dan *overload* (ODOL). Kesadaran yang meningkat akan menurunkan jumlah pelanggaran kendaraan ODOL.

“Kami memang menegakkan hukum secara intensif. Hanya saja, kami lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Kami mengharapkan kesadaran semua pengusaha logistik untuk mengikuti regulasi sesuai berat dan besaran muatan yang ditentukan. Apabila semua taat, maka tidak perlu kita melakukan transfer muatan, melakukan tilang, bahkan melakukan kegiatan yang lebih dari itu,” ucap Menhub memaparkan.*

TSDP

MENHUB APRESIASI PEMBUKAAN LINTAS PENYEBERANGAN DARI BANYUWANGI KE NUSA TENGGARA BARAT



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi pembukaan lintasan kapal Ro-Ro dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gilimas di Nusa Tenggara Barat.

“Saya senang melihat ada suatu pergerakan dari Banyuwangi menuju Lembar atau sebaliknya, juga dari Banyuwangi menuju Gilimas. Kami akan terus kembangkan angkutan Roro (penyeber-

rangan) menjadi lebih efektif,” kata Menhub di Pelabuhan Ketapang, Sabtu (24/4).

Menhub mengatakan, dengan dibukanya lintas Penyeberangan dari Banyuwangi ke Nusa Tenggara Barat menambah jumlah rute penyeberangan ke daerah Nusa Tenggara Barat yang tadinya hanya dari Surabaya. “Selamat kepada Ibu Bupati Banyuwangi, Dirjen Perhubungan Darat, ASDP, dan operator, Gapas-

TSDP

TINJAU WADUK KEDUNGOMBO, DITJEN HUBDAT TINGKATAN ASPEK KESELAMATAN ANGKUTAN SUNGAI-DANAU



Ditjen Perhubungan Darat memberi perhatian khusus pada angkutan sungai dan danau. Terlebih pasca terjadinya insiden perahu terbalik di kawasan wisata Waduk Kedungombo beberapa waktu lalu (15/5). Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, melakukan kunjungan kerja ke Waduk Kedungombo, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis (27/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Budi menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dalam insiden di Waduk Kedungombo. “Saya harap ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir, harus kita perbaiki semuanya” katanya. Dirjen Budi melanjutkan, “Kejadian ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, oleh sebab itu perlu perbaikan dan pembenahan, terutama peningkatan aspek keselamatan.”

Menurut Dirjen Budi, pihaknya akan melakukan beberapa hal demi peningkatan keselamatan angkutan sungai-danau di Waduk Kedungombo. Antara lain: pelatihan keselamatan bagi para operator kapal, pemberian *life jacket* bagi masyarakat pengguna jasa angkutan sungai-danau. Dirjen Budi mengatakan meski kapal digunakan dengan jarak yang tidak jauh, hanya menyeberang dari tepian menuju ke warung apung di tengah waduk, para penumpang tetap harus memakai *life jacket*. “Seperti kalau naik motor harus pakai helm, maka kalau naik kapal atau perahu ini harus pakai *life jacket*,” ujarnya.

dap. Ini harus di rawat dengan baik dan profesional. Dengan adanya lintasan baru ini berarti kegiatan perdagangan antara Banyuwangi dengan Lombok dan sekitarnya akan semakin baik,” tutur Menhub.

Menhub mengungkapkan, dengan dibukanya lintasan ini juga akan mengurangi kemacetan di Pulau Bali dan mengurangi kepadatan pada lintasan-lintasan lainnya seperti lintas Ketapang - Gilimanuk dan Padangbai - Lembar pada saat peak season. Saat ini angkutan barang dari Banyuwangi dapat langsung menggunakan kapal penyeberangan menuju daerah NTB, tanpa harus melalui Bali. Biaya angkutan logistik pun akan lebih efisien.

Selain lebih efisien untuk angkutan logistik, juga lebih murah biaya transportasinya untuk kegiatan pariwisata.

“Para turis dari Banyuwangi yang mau ke NTB menggunakan angkutan penyeberangan bisa langsung ke Pelabuhan Lembar, jadi lebih murah biayanya. Sebelumnya mereka harus ke Bali dulu, lalu jalan darat, lalu naik kapal lagi pasti lebih mahal biayanya,” kata Menhub.*

Insiden tenggelamnya perahu di Waduk Kedungombo bermula ketika ada sejumlah pengunjung hendak menyeberang menuju ke warung apung yang ada di tengah waduk. Perahu yang seharusnya hanya mampu mengangkut 14 orang, dinaiki oleh 21 orang. Kondisi kelebihan muatan ini mengakibatkan masuknya air ke dalam perahu sedikit demi sedikit. Kurang lebih 10 meter mendekati warung apung, penumpang panik melihat semakin banyak air masuk ke dalam perahu. Penumpang kemudian bergeser maju ke bagian depan perahu, menyebabkan perahu tidak seimbang, dan akhirnya perahu terbalik dan tenggelam.

Dirjen Budi juga mengatakan ke depan pihaknya juga akan membangun dermaga di Waduk Kedungombo. “Memang banyak yang harus kita lakukan, pembangunan dermaga, kapal yang berkeselamatan, operatornya atau nahkodanya juga, dan penting juga dukungan dari masyarakat,” ujarnya. Dermaga yang akan dibangun di Waduk Kedungombo berjenis ponton yang bisa fleksibel terhadap naik turunnya permukaan air pasang/surut.*

REGULASI

DITJEN HUBDAT GELAR UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN MENTERI BIDANG LLAJ



Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan Bidang LLAJ di Novotel Suites Malioboro, Yogyakarta, pada Kamis (22/4/2021).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual mengatakan, "Sebagai mekanisme dan pertanggungjawaban agar apa yang nanti kita buat mampu mengakomodir *stakeholder* terkait, menampung aspirasi pe-

mikiran dari para pakar transportasi, akademisi, serta pelaku usaha terkait, kami menggelar uji publik ini dengan harapan memperoleh masukan, saran, tanggapan, koreksi dan kritik, untuk penyempurnaan regulasi ini."

Uji publik ini perlu diselenggarakan dalam rangka penyempurnaan terhadap substansi dalam rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi jalan yang telah disusun.

Uji Publik yang sekarang ini adalah yang ke-2 kali. Sebelumnya telah pula digelar uji publik terhadap 2 RPM yaitu RPM tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Revisi dari PM 134 Tahun 2015 dan RPM tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Revisi dari PM 133 Tahun 2015.

Dirjen Budi melanjutkan, "Pada kegiatan ini terdapat 3 RPM yang akan diuji publik yaitu RPM tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; RPM tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan; dan RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan."

Dengan telah ditetapkan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja maka kementerian perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhu-

bugan Darat turut serta mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan iklim investasi di sektor transportasi darat melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020.

Terdapat 16 (enam belas) amanat untuk diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri perhubungan, yaitu terkait dengan analisis dampak lalu lintas, pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, terminal penumpang, angkutan jalan, dan penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari PP Nomor 30 Tahun 2021 maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa Peraturan Menteri Perhubungan, yaitu: RPM tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor; RPM tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan; dan RPM tentang penyelenggaraan angkutan jalan.

Revisi Permenhub tersebut diharapkan mampu mewujudkan visi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (*)

satker *sampling* Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut lagi, Marta mengatakan Saya mengapresiasi atas penyediaan data serta perbaikan data dalam menunjang kelancaran pelaksanaan reuiv oleh Inspektorat Jenderal (ITJEN) atas laporan penilaian PIPK tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA) Eselon I sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kembali mendapatkan hasil Pengendalian Internal Efektif di Tahun 2021.

Pada akhir sambutannya, Marta berharap kepada seluruh tim penyusun PPIPK Ditjen Hubdat untuk solid dan berkomitmen memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian *intern* yang memadai. (*)

KEUANGAN

PEMBAHASAN KONSEP TABEL RISK CONTROL MATRIX (RCM) TINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) 2021



Dalam rangka mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan yang andal, efektif, efisien dan akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Rapat Pembahasan Konsep Tabel *Risk Control Matrix* (RCM) Pengendalian *Intern* Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021 di Hotel Grand Zuri BSD City, Tangerang, Kamis (27/5).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono yang turut hadir dan berkesempatan membuka acara tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan rapat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian *Intern* atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pengendalian *Intern* atas Pelaporan Keuangan atau PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

"PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian *intern* yang memadai," ujar Marta.

Menurutnya, pelaksanaan PIPK pada tahun 2020 menilai akun signifikan persediaan dan aset tak berwujud dengan

TSDP

PENANDATANGANAN MOU PEMANFAATAN OPERASIONAL PELABUHAN DI KSPN DANAU TOBA



Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi dan Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspawati melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam rangka kerja sama pemanfaatan operasional pelabuhan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Acara ini digelar di Jakarta pada Kamis (15/4) siang.

Dalam sambutannya, Dirjen Budi menyampaikan bahwa pengoptimalan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pada BMN kepada pihak lain.

"Skema kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna angkutan pelabuhan di wilayah KSPN Danau Toba. Kami juga berharap kehadiran PT ASDP selain untuk mengelola prasarana dengan baik dalam aspek pelayanan, diharapkan dapat memberikan nilai lebih untuk meningkatkan kualitas masyarakat di sekitar Dermaga yang akan dikerjasamakan. Bisa dilakukan dengan menarik brand-brand lokal disana," urai Dirjen Budi.

Nantinya baik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) maupun PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka pengembangan pelabuhan di KSPN Danau Toba. Akan dilakukan juga pengawasan dan evaluasi pemanfaatan BMN dengan mekanisme kerjasama pemanfaatan operasional pelabuhan di KSPN Danau Toba di antara Ditjen Hubdat dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). (*)

TSDP

KEMENHUB DAN PIHAK TERKAIT DALAMI PENYEBAB INSIDEN KMP IHAN BATAK



Pada Senin (31/5) sekitar pukul 15.30 WIB tadi terjadi insiden yang menyebabkan 1 unit kendaraan jatuh dari KMP. Ihan Batak. Kendaraan mobil penumpang Avanza tersebut berisi 4 orang dengan kondisi 3 orang berhasil selamat, namun 1 orang meninggal dunia. Seluruh korban telah ditangani lebih lanjut.

Penyebab kejadian saat ini tengah didalami oleh unsur terkait seperti Kemenhub melalui BPTD, KNKT, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Dinas Perhubungan, dan Kepolisian setempat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam

insiden tersebut. "Kami turut berduka cita atas kejadian di KMP. Ihan Batak sehingga menyebabkan 1 orang korban meninggal dunia. Dari data yang kami peroleh saat itu kapal memuat penumpang sebanyak 120 orang penumpang dewasa dan 19 orang anak. Sementara kendaraan golongan II sebanyak 2 unit, golongan IV A 31 unit, dan golongan V A 1 unit," kata Dirjen Budi.

Kronologis kejadian itu yaitu sekira pukul 14.40 WIB, KMP. Ihan Batak tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Ambarita. Posisi kapal telah sandar, *rampdoor* kapal telah diturunkan dan proses bongkar muatan sedang dilakukan. Sebanyak 6 unit kendaraan telah melewati *rampdoor* menuju dermaga, namun ketika kendaraan ke 7 yaitu Avanza BK 1421 QP melewati *rampdoor*, angin bertiup kencang dan menggeser kapal sehingga menyebabkan *sling rampdoor* putus. Kendaraan yang sedang berada di *rampdoor* tergelincir masuk ke danau sehingga sebagian terendam air. Sejumlah petugas dibantu masyarakat mencoba mengikat dan menarik mobil tersebut dengan menggunakan tali. Karena beban mobil terlalu berat maka mobil tersebut menggantung di *rampdoor* kapal dengan posisi kepala mobil menghadap ke atas. (*)

TSDP

PERINGATI HARI SEPEDA DUNIA, MENHUB BERHARAP GAYA HIDUP GUNAKAN SEPEDA BERSAMBUNG DENGAN ANGKUTAN UMUM LEBIH MASIF



Dalam kegiatannya, Menhub bersama komunitas *Bike To Work* mencontohkan penggunaan sepeda sebagai *first mile* dan *last mile* dengan bersepeda menuju Halte MRT Senayan, kemudian menaiki MRT menuju Halte MRT Bundaran HI, dan selanjutnya kembali menggunakan sepeda menuju kantor Kemenhub di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

"Bersepeda harus menjadi suatu kegiatan keseharian kita, karena dengan bersepeda kita bisa semakin sehat dan sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Kami berharap sepeda dapat digunakan lebih masif lagi sebagai *first miles* dan *last miles* menuju simpul-simpul transportasi publik," kata Menhub.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan bersepeda sebagai kegiatan keseharian. Tidak hanya untuk berolahraga di akhir pekan, namun sebagai gaya hidup menggunakan sepeda yang bersambung dengan penggunaan angkutan umum massal dapat lebih masif dilakukan. Hal ini disampaikan Menhub ketika memperingati Hari Sepeda Sedunia (*World Bicycle Day*) pada 3 Juni 2021 dan sekaligus melakukan *kick off* Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2021, Jumat (4/6).



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi didampingi Kepala BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, Denny Michels Adlan meninjau pelaksanaan Tes Swab Antigen Gratis di UPPKB Balonggandu, Karawang, Jawa Barat (15/5/2021). Foto: HMS DJPD/CAS.

KEMENHUB ADAKAN TES SWAB ANTIGEN GRATIS DI UPPKB BALONGGANDU

Kementerian Perhubungan adakan layanan tes swab antigen gratis bagi masyarakat khusus bagi pengguna roda 2 yang belum memiliki bukti bebas Covid-19 yang melintas di UPPKB Balonggandu, Karawang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan bahwa hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperketat pergerakan masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas wilayah. "Sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan hari ini kita akan memperketat pergerakan masyarakat yang akan kembali ke Jakarta. Pada prinsipnya kami inginkan semua masyarakat yang akan ke Jakarta adalah masyarakat yang sehat, tidak terpapar Covid-19 dan kita harapkan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sebagainya. Untuk itu semua pintu masuk Jakarta akan kita lakukan dengan *rapid test* antigen," jelas Dirjen Budi pada Sabtu (15/5) di UPPKB Balonggandu.

Posko tes acak ini merupakan hasil sinergi antar instansi seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian, TNI dan khusus untuk di UPPKB Balonggandu ditangani oleh tim Ditjen Perhubungan Darat dan melakukan pemeriksaan acak *rapid test* antigen kepada masyarakat pengendara sepeda motor.

"Ini *random check* karena setelah di-inventarisasi ketersediaan alat *rapid test* dari Satgas Covid-19 maupun Kementerian Kesehatan harus dibagi agar merata. Walaupun dilakukan *random sampling* namun kita harapkan dilakukan pemeriksaan terhadap mayoritasnya," tambah Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi, upaya ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang akan kembali ke Jakarta adalah orang yang sehat dan dapat melengkapi syarat perjalanan ataupun telah melakukan tes di wilayah masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Pengelola Trans-

portasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, Denny Michels Adlan mengutarakan, "Konsentrasi kita untuk arus balik itu di daerah perbatasan Jawa Tengah ke Jawa Barat. Kita juga ada titik di daerah Cijolang, Banjar namun di sana hanya pemeriksaan surat-surat dan mungkin akan ada tes GeNose di sana. Nanti kita lihat situasinya seperti apa kalau memang bisa ditambah jumlah tes antigennya nanti kita laksanakan juga," kata Denny.

"Kami juga memastikan 21 *rest area* dan juga gerbang tol utama dari Surabaya sampai Jakarta sudah kita dirikan pos seperti di Balonggandu. Dalam pos ini intinya pengujian terhadap masyarakat yang akan ke Jakarta. Kalau hasilnya positif nanti akan ada *treatment* khusus dan tindakan lanjutan dari Kementerian Kesehatan tapi kalau negatif dapat melanjutkan perjalanan," tutup Dirjen Budi dalam keterangannya.

Selain di UPPKB Balonggandu, Dirjen Budi juga melakukan pemantauan di *Rest Area* Km 62 B, dan Pos Penyekatan Km 47 B Tol Jakarta-Cikampek, arah Jakarta. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani; Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah; dan Direktur Lalu Lintas, Suharto.*



◀ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kakorlantas Polri, Irjen Pol Istiono, dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 2021, di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, 2/4/2021. Foto: HMS DJPD/BYU



◀ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, meninjau Pos Penyekatan Terpadu di Exit Tol Pejagan, 9/5/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

▶ Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memberikan pengarahan pada peserta apel persiapan pelaksanaan Tes Swab Antigen Gratis bagi masyarakat pengguna sepeda motor di UPPKB Balongandu, Karawang, Jawa Barat, 15/5/2021. Foto: HMS DJPD/DS



▶ Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Cucu Mulyana dan pejabat terkait melakukan kunjungan ke Waduk Kedungombo dan Rawa Pening, Jawa Tengah, 27/5/2021. Foto: HMS DJPD/BYU



▲ Sesditjen Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono bersama Kepala BPTD XVII Kaltim-Kaltara, Avi Mukti Amin; Kepala BPTD X Jateng-DIY, Eko Agus Susanto; dan Kepala BPTD IX Jawa Barat, Denny Michels Adlan mengunjungi pameran kendaraan listrik usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan di Solo, Jawa Tengah, 9/6/2021. Foto: HMS DJPD/CAS



◀ Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Cucu Mulyana meninjau progres pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Bias Munjul, Bali 18/6/2021. Foto: HMS DJPD/DS



◀ Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi memberikan keterangan pers terkait tenggelamnya KMP. Yunico di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Bali, 30/6/2021. Foto: HMS DJPD/BYU



► Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menghadiri pengambilalihan pengelolaan navigasi penyeberangan atau Local Port Service (LPS) di Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten, 8/6/2021. Foto: HMS DJPD/MAD



► Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam peringatan Hari Sepeda Sedunia (World Bicycle Day), 4/6/2021. Foto: HMS DJPD/WBW



► Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani memeriksa dokumen perjalanan pada masa peniadaan pada masa peniadaan pada masa peniadaan mudik di Gerbang Tol Palimanan, 8/5/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

